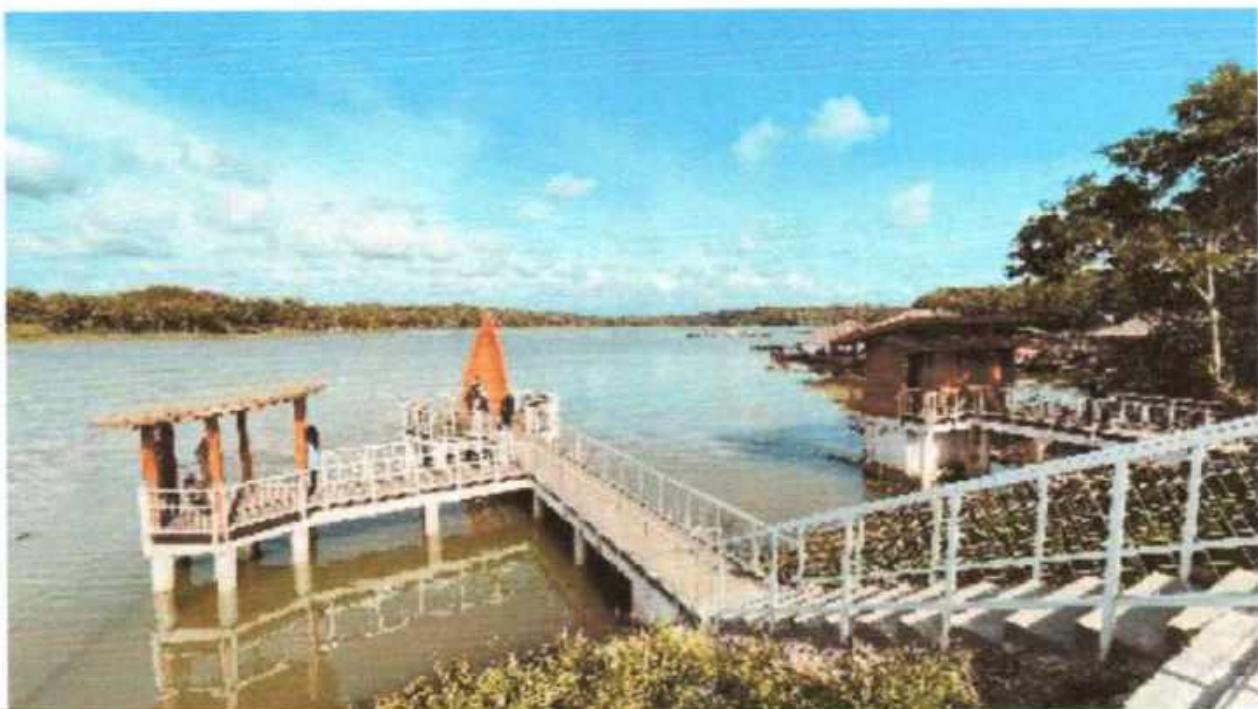




DINAS PARIWISATA PROVINSI BANTEN

LKJiP 2023

Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah



IKHTISAR EKSEKUTIF

Capaian Kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2023 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut :

I. Capaian Strategis 1 :

“ Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan (Domestik dan Asing)”

Berdasarkan data tersebut capaian ini terlihat bahwa posisi s.d desember 2023 adalah berjumlah 25.349.258 orang wisatawan nusantara sementara untuk kunjungan wisatawan mancanegara sejumlah 314.755 orang sehingga jumlah total kunjungannya menjadi 25.664.013 orang sehingga pencapaian prosentase kunjungannya sebesar 127.93 %

Analisis ketercapaian kinerja sasaran pertama “Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan (Domestik dan Asing)” adalah sebagai berikut :

1. Prosentase capaian diatas target menjadi 127.93 % dimana terkontribusi pertumbuhan positif wisatawan dari setiap bulan yang dilaporkan
2. Dibandingan dengan realisasi tahun sebelumnya capaian kunjungan lebih menurun secara kualitas (jumlah) namun secara kuantitas meningkat karena kunjungan tahun sebelumnya terdapat kunjungan ke pusat perbelanjaan
3. Peningkatan kunjungan wisatawan ini dipengaruhi dengan adanya penataan dan pengembangan destinasi wisata serta promosi event, hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan data kunjungan dari Kabupaten Lebak.
4. Optimalnya kegiatan fasilitasi / pendampingan pelaporan Simparda yang diselenggarakan oleh bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Provinsi Banten sehingga mempengaruhi kualitas dari durasi waktu penyampaian laporan.
5. Berdampaknya seluruh aktifitas program dan kegiatan sehingga pencapaiannya tepat sasaran

Capaian Strategis kedua “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan” keberhasilannya dipengaruhi oleh hal – ha sebagai berikut :

1. Pada saat dilakukan penilaian oleh APIP terpenuhinya seluruh komponen penilaian SAKIP dengan peroleh skor 81.25 %

2. Tidak terdapat deviasi perhitungan antara target dan hasil bobot yang dihitung kegiatan yang mendukung terhadap capaian urusan penunjang program pemerintahan daerah.
3. Pada teknis pelaksanaan tersedianya *tools* pengisian pengukuran kinerja Sistem Informasi Kinerja Aparatur (SIKAP) oleh BKD Banten mempermudah para *Middle manager* (PPTK) melakukan pemantauan dan pengawasan terkait pekerjaan harian yang umumnya terhubung dengan kegiatan baik sebagai kinerja penunjang maupun pendukung sehingga efektifitas pengawasan berjalan baik dan hal tersebut berdampak terhadap waktu dan kualitas dari pelaksanaan kegiatan.
- 4 terdapat komitmen yang memadai berupa perjanjian kinerja yang terukur antara target dan kinerja yang disusun oleh masing – masing *lower manager* (ketua tim pelaksana kegiatan) sehingga mempengaruhi ketercapaian terhadap sasaran kinerja program.
5. Ketercapaian terhadap program dan kegiatan telah mengarah kepada capaian outcome seperti ;
 - a. Tersedianya dokumen perencanaan yang SMART sehingga memudahkan PPTK, Kassubag dan Fungsional umum untuk mencapai target dan tujuan kegiatannya
 - b. Terdapat efisiensi dan efektifitas terhadap seluruh kegiatan hal ini dapat dilihat dari adanya efisiensi penyerapan anggaran sehingga sisa penyerapan dimaksud dapat dilakukan optimalisasi guna mendukung target program dan sasaran strategis lainnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023 adalah pertanggungjawaban pelaksanaan akuntabilitas kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Anggaran hingga Sub kegiatan yang selaras. Untuk mendukung pelaporan kinerja akuntabel diperlukan pedoman dalam menyusun laporan kinerja di maksud, Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi yang menjadi acuan dalam menyusun pelaporan kinerja yang efetif dan akuntabel

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami Panjatkan ke Khadirat Allah SWT, karena dengan Ridho dan Rahmat-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023 dapat diselesaikan.

Laporan ini merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan yang berisi sasaran, program, penjelasan tentang kinerja kegiatan, capaian kinerja dan analisis capaian kinerja dalam rangka mencapai sasaran Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2023-2026 serta mengakselerasikan dengan rencana pencapaian Tahun 2023.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai pijakan dalam upaya meningkatkan kinerja aparatur Dinas Pariwisata Provinsi Banten di masa yang akan datang, Amin.

Serang, Januari 2024

KEPALA DINAS
PARIWISATA PROVINSI BANTEN



DAFTAR ISI

Cover	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2 Maksud Tujuan	1
1.3 Dasar Hukum	1
1.4 Struktur Organisasi , Tugas Pokok dan Fungsi	3
1.5 Isu – isu Strategis	11
1.6 Proses Bisnis	13
1.7 Cascading Kinerja	14
1.8 Tindak Lanjut LHE SAKIP	17
1.9 Sistematika Laporan	20
BAB II PERENCANAAN KINERJA	25
2.1 Rencana Strategis 2023 – 2026.....	26
2.2 Rencana Kinerja 2023	27
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	35
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	37
3.1 Capaian Kinerja 2023	37
3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini	38
3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian Kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun Terakhir	66
3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	67

3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);	68
3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi Yang telah dilakukan	69
3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	72
3.1.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).....	75
3.2 Realisasi Anggaran	82
3.3 Inovasi	87
BAB IV PENUTUP	89
4.1 Kesimpulan	89
4.2 Saran dan Rekomendasi	89

Lampiran – lampiran :

1. Perjanjian Kinerja Esselon 2
 - a. Murni Tahun 2023
 - b. Perubahan Tahun 2023
2. Surat Pernyataan Telah di Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pariwisata Provinsi Banten

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023 merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di Dinas Pariwisata Provinsi Banten dalam bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja pelaksanaan Program kegiatan dan anggaran dengan berdasarkan pada masa Rencana Strategis Dinas tahun 2023-2026.

Dinas Pariwisata Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2023 berupaya merespon masukan,saran dan pendapat masyarakat yang termuat dari usulan program dan kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Governance*. Agar prinsip *Good Governance* dapat diimplementasikan dengan baik maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah secara integral. *Good governance* yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik, profesionalisme, etos kerja dan moral yang tinggi. Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat.

1.2 Maksud Tujuan

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan tugas pemerintahan dan tugas pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, bertanggungjawab. Konsep dasar akuntabilitas adalah penjelasan *managerial* yang bertanggungjawab dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Hal ini berarti setiap aparatur Dinas Pariwisata bertanggung jawab terhadap kegiatan yang dilaksanakan dan kegiatan tersebut benar-benar direncanakan dan dilaksanakan dengan baik.

1.3 Dasar Hukum

Penyusunan LAKIP Tahun Anggaran 2023, Dinas Pariwisata Provinsi Banten berdasarkan pada Peraturan Per-Undang-Undangan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

1.4 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan

Seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 24 Tahun 2002, mengalami reorganisasi menjadi Dinas Pariwisata Provinsi Banten Provinsi Banten berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016. Kedudukan Dinas Pariwisata Provinsi Banten sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pariwisata yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang pariwisata.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten No. 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Sususunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Daerah.

A. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan organisasi Dinas Pariwisata Provinsi Banten terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahkan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Kepala Bidang Destinasi Pariwisata;
- d. Kepala Bidang Pemasaran;
- e. Kepala Bidang Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- f. Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- g. Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan
- h. Unit Plaksana Teknis Dinas

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Dinas Pariwisata mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pariwisata dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
2. Dinas pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada tugas dan fungsi no (1) menyelenggarakan fungsi dan kewenangan;
 - a. Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
 - b. Pemasaran Pariwisata;

- 2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
- 4) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- c. Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;
- d. Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang- undangan.

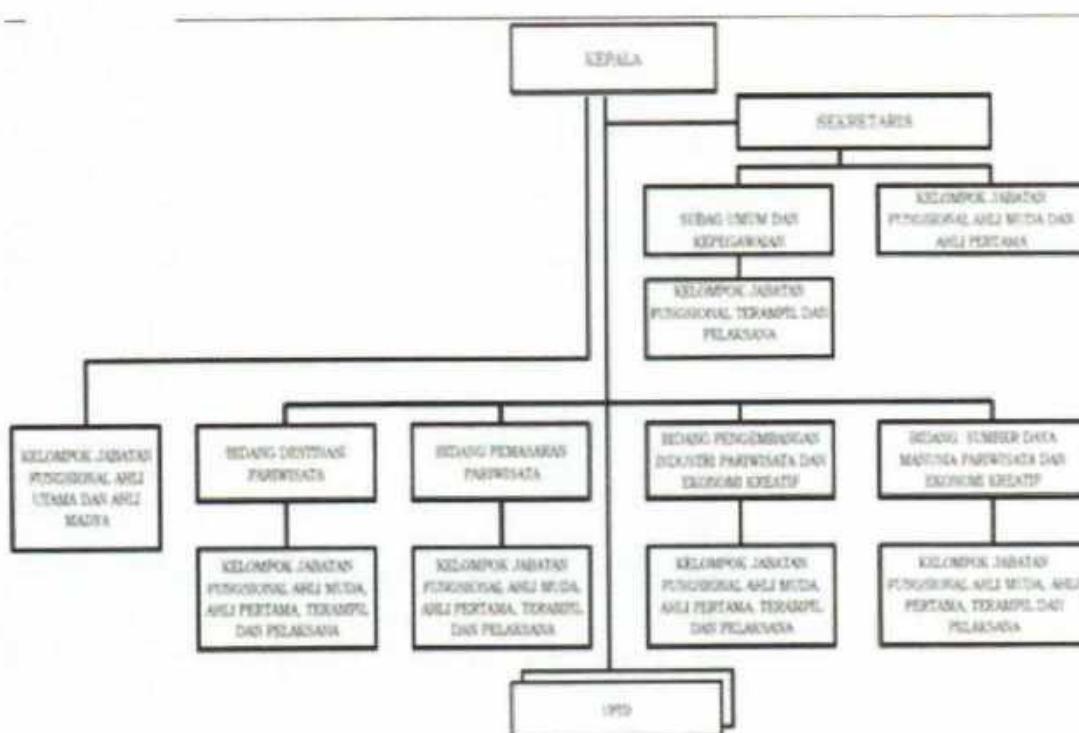
C. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan organisasi Dinas Pariwisata Provinsi Banten terdiri dari :

- i. Kepala Dinas;
- j. Sekretaris, membawahkan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- k. Kepala Bidang Destinasi Pariwisata;
- l. Kepala Bidang Pemasaran;
- m. Kepala Bidang Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- n. Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- o. Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan
- p. Unit Plaksana Teknis Dinas

Struktur organisasi Dinas Pariwisata tergambar sebagai berikut :

Gambar 1.4



Berikut adalah uraian tugas pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pariwisata mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- 1) Merumuskan Rencana Strategis dan Rencana Kerja di Lingkungan Dinas Pariwisata;
- 2) Menetapkan Rencana Kerja Dinas Pariwisata;
- 3) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pariwisata sesuai dengan program yang telah ditetapkan;
- 4) Membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Pariwisata sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku;
- 5) Merumuskan penyelenggaraan;
 - a. Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata,
 - b. Pemasaran pariwisata;
 - c. Pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual;
 - e. Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.
- 6) Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan bidang pariwisata yang menjadi kewenangan provinsi;
- 7) Menyelenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi, dan pelaporan Dinas Pariwisata;
- 8) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretaris

- a. Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pariwisata dalam melaksanakan perumusan, penetapan, pengoordinasian, dan pengendalian pelaksanaan tugas.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - 1) Menyusun rencana kerja di lingkungan Sekretariat berdasarkan Rencana Strategis Dinas;
 - 2) Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Sekretariat;

- 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
- 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat;
- 5) Merencanakan rumusan kebijakan perencanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan program/kegiatan, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas Pariwisata;
- 6) Menyelenggarakan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Dinas;
- 7) Menyelenggarakan Administrasi Keuangan Dinas;
- 8) Menyelenggarakan Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas;
- 9) Menyelenggarakan Administrasi Kepegawaian Dinas;
- 10) Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas;
- 11) Menyelenggarakan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- 12) Menyelenggarakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 13) Menyelenggarakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 14) Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan dilingkungan dinas;
- 15) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif kegiatan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan dinas;
- 16) Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat;
- 17) Menyelenggarakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
- 18) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan administrasi surat menyurat, menyelenggarakan kearsipan, pengelolaan barang dan asset, kerumahtanggaan, kepustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian Dinas Pariwisata.

- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- 1) Merencanakan sub kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Mengoordinasikan pelaksanaan sub kegiatan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3) Membagi tugas kepada bawahan;
 - 4) Membimbing dan membina pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 5) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 6) Melaksanakan Pengadaan Barang Milik Daerah;
 - 7) Melaksanakan Administrasi Kepegawaian Dinas;
 - 8) Melaksanakan Administrasi Umum, Tata usaha dan Kehumasan Dinas;
 - 9) Melaksanakan Penatausahaan Arsip Dinamis pada Dinas;
 - 10) Melaksanakan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Dinas;
 - 11) Melaksanakan Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas;
 - 12) Melaksanakan Penyediaan Jasa Penunjang;
 - 13) Melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah;
 - 14) Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 15) Melaksanakan pelaporan hasil pelaksanaan kerja di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 16) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Kepala Bidang Destinasi Pariwisata

- a. Kepala Bidang Destinasi Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu kepala Dinas Pariwisata dalam merencanakan dan perumusan program, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
 - b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Destinasi Pariwisata mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- 1) Menyusun rencana kerja di lingkungan Bidang berdasarkan Rencana Strategis Dinas;

- 2) Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan bidang;
- 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
- 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang;
- 5) Menyelenggarakan, mengendalikan, dan mengevaluasi;
 - a. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi,
 - b. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi,
 - c. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi,
 - d. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.
- 6) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan dinas;
- 7) Menyelenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan pada bidang; dan
- 8) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata

- a. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu kepala Dinas Pariwisata dalam merencanakan dan perumusan program, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - 1) Menyusun rencana kerja di lingkungan Bidang berdasarkan Rencana Strategis Dinas;
 - 2) Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan bidang;
 - 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
 - 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang;
 - 5) Menyelenggarakan, mengendalikan, dan mengevaluasi;
 - a. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi;

- b. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi.
 - 6) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan dinas;
 - 7) Menyelenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan pada bidang; dan
 - 8) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Kepala Bidang Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- a. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai tugas pokok membantu kepala Dinas Pariwisata dalam merencanakan dan perumusan program, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
 - b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- 1) Menyusun rencana kerja di lingkungan Bidang berdasarkan Rencana Strategis Dinas;
 - 2) Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan bidang;
 - 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
 - 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang;
 - 5) Menyelenggarakan, mengendalikan, dan mengevaluasi;
 - a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif;
 - b. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif.
 - 6) Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan dengan UPTD;
 - 7) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan dinas;
 - 8) Menyelenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan pada bidang; dan
 - 9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- a. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas pokok membantu kepala Dinas Pariwisata

dalam merencanakan dan perumusan program, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- 1) Menyusun rencana kerja di lingkungan Bidang berdasarkan Rencana Strategis Dinas;
 - 2) Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan DI di lingkungan bidang;
 - 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
 - 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang;
 - 5) Menyelenggarakan, mengendalikan, dan mengevaluasi;
 - a. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan;
 - b. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif.
 - 6) Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan dengan UPTD;
 - 7) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan dinas;
 - 8) Menyelenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan pada bidang; dan
 - 9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.5 Isu - isu strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, sehingga dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Dinas Pariwisata Provinsi Banten senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh sebab itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Banten adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Pariwisata dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

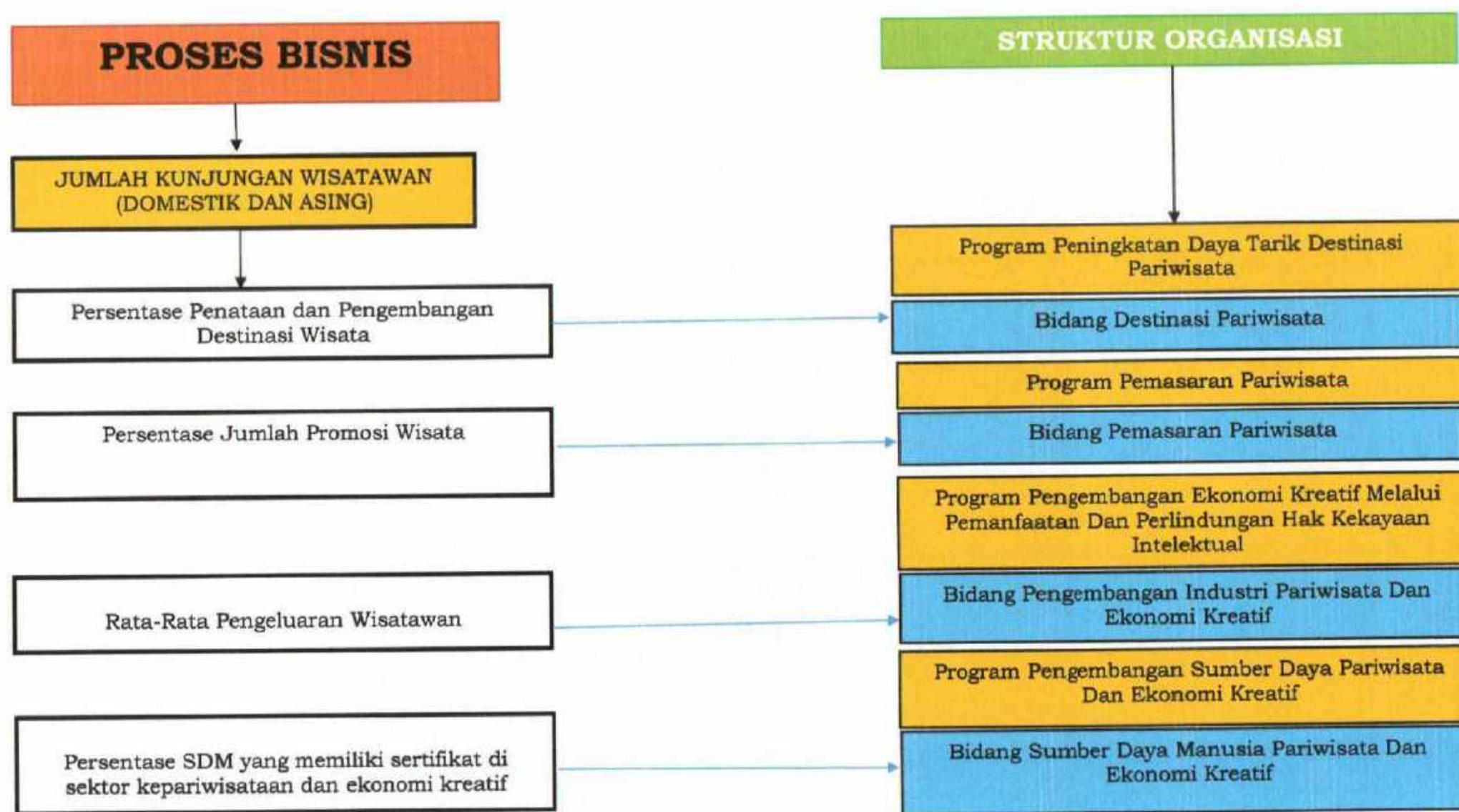
Arah dan strategi kebijakan pengembangan pariwisata akan sangat dipengaruhi nilai-nilai strategis dan kondisi lingkungan strategis internal dan lingkungan strategis eksternal Dinas Pariwisata. Analisa SWOT terhadap lingkungan strategis internal maupun eksternal yang mempunyai pengaruh terhadap pengembangan pariwisata perlu dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan langkah yang tepat dalam rangka melaksanakan upaya-upaya pengembangan pariwisata sesuai keadaan potensi pariwisata di Provinsi Banten.

Berdasarkan kajian aspek-aspek sebagaimana tersebut di atas maka dapat disampaikan isu-isu strategis pembangunan pariwisata di Provinsi Banten ditinjau dari gambaran pelayanan dinas dalam sasaran jangka menengah pada Renstra Dinas Pariwisata. Isu strategis Daerah "Daya Saing Perekonomian" di lingkungan urusan pariwisata Provinsi Banten adalah "Pertumbuhan Ekonomi Pasca Pandemi Covid 19". Isu strategis Dinas Pariwisata adalah "Rendahnya Jumlah Kunjungan Wisata dan Daya Saing Ekonomi Kreatif". Isu Strategis Dinas Pariwsata tersebut dijabarkan sebagai berikut :

1. Belum memadai pengelolaan destinasi pariwisata dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pariwisata, seperti akses jalan menuju destinasi, dan amenitas;
2. Belum optimal peran masyarakat dan kemitraan antar pemangku kepentingan dalam melakukan pemasaran dunia usaha pariwisata;
3. Belum optimal Promosi destinasi pariwisata di dalam & luar negeri secara langsung dan melalui pemanfaatan media massa, elektronik, dan media cetak serta teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana Dinas Pariwisata Provinsi Banten;
4. Terbatasnya dukungan pemerintah kabupaten/kota mendukung promosi pariwisata daerah;
5. Rendahnya Kompetensi dan kualitas sumber daya manusia (SDM) pariwisata;
6. Terbatasnya ketersediaan data dan informasi kepariwisataan untuk mendukung penetapan kebijakan dan operasional kepariwisataan;

Gambar 1.3

KETERKAITAN PROSES BISNIS DENGAN STRUKTUR ORGANISASI



1.7 Cascading Kinerja

Sebagaimana amanat Peraturan Gubernur Banten Nomor 67 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan

Gambar 1.1

SKEMA PENUANGAN POHON KINERJA KE KOMPONEN PERENCANAAN DAN KINERJA JABATAN DINAS PARIWISATA



Gambar 1.2

Program	Program	Program	Program
Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pemasaran Pariwisata	Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Pengembangan Sumberdaya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Sasaran Program	Sasaran Program	Sasaran Program	Sasaran Program
Meningkatnya Penataan dan Pengembangan Destinasi Wisata	Meningkatnya Informasi Pariwisata	Meningkatnya nilai tambah produk ekonomi kreatif	Meningkatnya kompetensi sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif
Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja
1. Persentase Penataan dan Pengembangan Destinasi Wisata 2. Rata-Rata Lama inap	1. Persentase Jumlah Promosi Wisata 2. Persentase Kunjungan Jumlah Wisatawan	1. Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan 2. Persentase Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif Provinsi	Persentase SDM yang memiliki sertifikat di sektor kepariwisataan dan ekonomi kreatif
Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan
1. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi 2. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi 3. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi 4. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif 2. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan 2. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif
Sasaran Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Sasaran Kegiatan
1. Terkelolaanya Daya Tarik Wisata Provinsi 2. Terkelolaanya Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi 3. Terkelolaanya Destinasi Pariwisata Provinsi 4. Terlaksananya Penetapan Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah	Terlaksananya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	1. Terlaksananya Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif 2. Terlaksananya Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	1. Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan 2. Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif

Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
Indikator Kegiatan	Indikator Kegiatan	Indikator Kegiatan	Indikator Kegiatan
1. Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi 2. Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi 3. Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi 4. Persentase Ketercapaian Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	1. Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif 2. Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	1. Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan 2. Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif

1.8 Tindak Lanjut atas laporan hasil evaluasi SAKIP Tahun 2022

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Menyusun Rencana Aksi terhadap capaian indikator dalam Perjanjian Kinerja / Renja	Dinas Pariwisata Provinsi Banten telah menyusun Rencana Aksi terhadap capaian indikator dalam Perjanjian Kinerja / Renja
2	Menyusun dokumen laporan hasil pengukuran kinerja secara berkala	Dinas Pariwisata Provinsi Banten telah Menyusun dokumen laporan hasil pengukuran kinerja secara berkala yang dituangkan dalam laporan triwulanan
3	Dasar pengukuran kinerja dijadikan dasar dalam ; <ul style="list-style-type: none"> a. Pemberian nilai atas kinerja ASN dalam melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan tugas dan fungsinya b. Perencanaan dan penganggaran dalam kurun waktu 1 (satu) tahun 	Dinas Pariwisata Provinsi Banten telah menyesuaikan nilai atas kinerja ASN melalui sistem SAKIP dan memasukan pengukuran Perencanaan dan penganggaran dalam dokumen rencana kerja
4	Menyusun dan Menetapkan Keputusan Kepala Dinas terkait SK Tim SAKIP (evaluasi AKIP internal)	Dinas Pariwisata Provinsi Banten telah membuat SK Tim terkait SAKIP
5	Informasi dalam LAKIP dapat digunakan dalam ; <ul style="list-style-type: none"> a. Penyesuaian perencanaan kinerja tahun berikutnya b. Perubahan Budaya Organisasi lebih baik 	Dinas Pariwisata Provinsi Banten telah memasukan : <ul style="list-style-type: none"> a. Penyesuaian perencanaan kinerja tahun berikutnya b. Perubahan Budaya Organisasi lebih baik yang dituangkan ke dalam dokumen LKjIP 2022

6	Menyusuan rencana atas laporan tindaklanjut hasil perbaikan dan penyempurnaan atas rekomendasi yang tertuang dalam berita acara SAKIP	Dinas Pariwisata Provinsi Banten telah menyusun laporan laporan tindaklanjut hasil perbaikan dan penyempurnaan atas rekomendasi yang sudah disampaikan ke Inspektorat Tahun 2022
7	Pengukuran kinerja pada laporan LKIP menyajikan analisis capaian kinerja	Dinas Pariwisata Provinsi Banten telah melaporkan Pengukuran kinerja di Bab III pada laporan LKIP TA. 2023 menyajikan analisis capaian kinerja

NO	BEFORE	AFTER	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	STATUS/ PROGRES PENYELESAIAN
1	Menyusun sistematika dalam LKIP sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Telah dipenuhi dalam sistematika LKjIP 2022	2 Hari	6 s.d 7 Maret 2023	Selesai
2	Menyajikan Informasi dan Pendukung capaian indikator kinerja Sasaran	Telah dipenuhi dalam sistematika LKjIP 2022	2 Hari	6 s.d 7 Maret 2023	Selesai
3	Menyajikan data dukung dapat diandalkan	Telah dipenuhi dalam sistematika LKjIP LKjIP 2022	2 Hari	6 s.d 7 Maret 2023	Selesai
4	Membentuk tim penyusun dan penanggungjawab	Telah dipenuhi dengan melampirkan SK Tim	2 Hari	6 s.d 7 Maret 2023	Selesai

		LKjIP	LKjIP 2022			
5	pengumpulan data kinerja					
5	Menyusun SOP pengumpulan dan pengelolaan data kinerja	Telah dipenuhi dengan melampirkan SOP LKjIP 2022	2 Hari	6 s.d 7 Maret 2023	Selesai	
6	Menyajikan informasi yaitu :					
	a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini	Telah dipenuhi dan terlampir dalam dokumen LKjIP 2022	2 Hari	6 s.d 7 Maret 2023	Selesai	
	b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir					
	c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi					
7	Melampirkan dokumen seperti					
	a. Definisi Operasional (perhitungan capaian kinerja)	Telah dipenuhi, terlampir DO	2 Hari	6 s.d 7 Maret 2023	Selesai	
	b. Sumber data dalam mendukung capaian kinerja sasaran dari lembaga eksternal seperti Kementerian terkait BPS dan Lainnya (jika capaian indikator kinerja berdasarkan sumber data eksternal	Telah dipenuhi, Terlampir, capaian BPS, Buku PDRB dan Nespara 2022	2 Hari	6 s.d 7 Maret 2023	Selesai	

1.9 Sistematika Laporan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2 Maksud Tujuan
- 1.3 Dasar Hukum
- 1.4 Struktur Organisasi , Tugas Pokok dan Fungsi
- 1.5 Isu – isu Strategis
- 1.6 Proses Bisnis
- 1.7 Cascading Kinerja
- 1.8 Tindak Lanjut LHE SAKIP
- 1.9 Sistematika Laporan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Rencana Strategis 2023 – 2026
- 2.2 Rencana Kinerja 2023
- 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Capaian Kinerja 2023
 - 3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
 - 3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian Kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun Terakhir
 - 3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
 - 3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
 - 3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi Yang telah dilakukan
 - 3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
 - 3.1.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja)
- 3.2 Realisasi Anggaran
- 3.3 Inovasi

BAB IV PENUTUP

- 4.1 Kesimpulan
- 4.2 Saran dan Rekomendasi

Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan anggaran pada tahun 2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan dan Pendidikan

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN						JUMLAH
		S3	S2	S1	D3	D2	SLTA	
1	Kepala Dinas	-	1	-	-	-	-	1
2	Sekretaris	-	-	1	-	-	-	1
3	Kepala Bidang/UPT	-	2	1	-	-	-	3
4	Kepala Subbag	-	-	1	-	-	-	1
5	Fungsional	-	10	5	-	-	-	15
6	Staf / Pelaksana	-	4	13	8	-	7	32
7	Pramubakti Administrasi	-	2	12	-	1	14	29
TOTAL		0	19	33	8	1	21	84
% terhadap Jumlah Pegawai		0	22,62	39,29	9,52	1,19	25,00	100,00

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Pariwisata, 2022

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Dinas Pariwisata Provinsi Banten didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 33 orang (39,29%) , disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 19 orang (22.62%), D3 8 orang (9.52%), SLTA sebagai staf pelaksana dan pramubakti administrasi sebanyak 21 orang (25.00%). Komposisi pegawai laki-laki sedikit lebih banyak dibanding pegawai perempuan; namun untuk jabatan struktural lebih banyak dijabat perempuan. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Sarana dan Prasarana

No	Uraian	Jumlah
1	ASET	
11	ASET LANCAR	
111	Kas dan Setara Kas	2,474,861,180.00
11101	Kas di Kas Daerah	0.00
11102	Kas di Bendahara Pengeluaran	2,474,861,180.00
11103	Kas di Bendahara Penerimaan	0.00
11104	Kas di BLUD	0.00
11105	Kas di Bendahara BOS	0.00
11106	Kas Lainnya	0.00
112	Investasi Jangka Pendek	0.00
113	Piutang	278,900,000.00
11301	Piutang Pajak	0.00
1130101	Piutang Pajak (Bruto)	0.00

1130102	Penyisihan Piutang Pajak	0.00
11302	Piutang Retribusi	0.00
1130201	Piutang Retribusi (Bruto)	0.00
1130202	Penyisihan Piutang Retribusi	0.00
11303	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0.00
1130301	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (Bruto)	0.00
1130302	Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0.00
11304	Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	0.00
1130401	Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah (Bruto)	0.00
1130402	Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	0.00
11305	Belanja Dibayar Dimuka	0.00
11306	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	0.00
1130601	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (Bruto)	0.00
1130602	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	0.00
11307	Piutang Lainnya	278,900,000.00
1130701	Piutang Lainnya (Bruto)	278,900,000.00
1130702	Penyisihan Piutang Lainnya	0.00
117	Persediaan	0.00
	JUMLAH ASET LANCAR	2,753,761,180.00
12	INVESTASI JANGKA PANJANG	
122	Investasi Permanen	0.00
12201	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0.00
	JUMLAH INVESTASI	0.00
13	JANGKA PANJANG	
13	ASET TETAP	
131	Tanah	0.00
132	Peralatan dan Mesin	12,766,396,483.77
133	Gedung dan Bangunan	22,189,285,033.00
134	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0.00
135	Aset Tetap Lainnya	106,510,000.00
136	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0.00
137	Akumulasi Penyusutan	(20,768,842,996.74)
	JUMLAH ASET TETAP	14,293,348,520.03
14	DANA CADANGAN	
141	Dana Cadangan	0.00
	JUMLAH DANA CADANGAN	0.00
15	ASET LAINNYA	
153	Aset Tak Berwujud	0.00
15301	Aset Tak Berwujud (Bruto)	0.00
15302	Amortisasi Aset Tak Berwujud	0.00
154	Aset Lain-lain	195,981,199.99
15401	Aset Lain-lain (Bruto)	247,555,200.00
15402	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(51,574,000.01)
155	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0.00
15501	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (Bruto)	0.00
15502	Akumulasi Penyusutan Tuntutan Ganti KerugianDaerah	0.00
	JUMLAH ASET LAINNYA	195,981,199.99

		JUMLAH ASET	17,243,090,900.02
2	KEWAJIBAN		
21	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
211	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PK)	(5,988,293.00)	
213	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0.00	
214	Pendapatan Diterima Dimuka	0.00	
215	Utang Belanja	1,778,665,000.00	
216	Utang Jangka Pendek Lainnya	0.00	
		JUMLAH KEWAJIBAN	1,772,676,707.00
	JANGKA PENDEK		
22	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
221	Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0.00	
		JUMLAH KEWAJIBAN	0.00
	JANGKA PANJANG		
		JUMLAH KEWAJIBAN	1,772,676,707.00
3	EKUITAS		
31	EKUITAS		
311	Ekuitas	15,470,414,193.02	
		JUMLAH EKUITAS	15,470,414,193.02

Sumber : Data Neraca Dinas Pariwisata (unaudited) tanggal 5 Desember 2023

Sarana dan Prasarana

No	Uraian	Jumlah
13	ASET TETAP	14.293.348.520,03
131	Tanah	
132	Peralatan dan Mesin	12.766.396.483,77
132	Gedung dan Bangunan	22.189.285.033,00
134	Jalan, Irigasi dan Jaringan	
135	Aset Tetap Lainnya	106.510.000,00
136	Kontruksi dalam Penggerjaan	
137	Akumulasi Penyusutan	(20.768.842.996,74)
15	ASET LAINNYA	
153	Aset tak Berwujud (bruto)	0
15301	Amortisasi Aset tak Berwujud	0
154	Aset Lain – lain	195.981.199,99
15401	Aset Lain – lain (bruto)	247.555.200,00
15402	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(51.574.000,01)
155	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0
15501	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (bruto)	0
15502	Akumulasi Penyusutan Tuntutan Ganti KerugianDaerah	0
	JUMLAH	17.243.090.900,02

Dinas Pariwisata Provinsi Banten s/d tahun 2023 telah memiliki jumlah aset kendaraan sebanyak 33 unit kendaraan operasional kantor yang terdiri dari :

- a. 1 Unit kendaraan roda enam
- b. 14 unit kendaraan roda empat

c. 18 unit kendaraan roda dua

serta memiliki 1 Gedung Kantor Dinas Pariwisata Provinsi Banten yang terletak di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) bertempat di Jalan Syech Nawawi Al Bantani Curug Kota Serang, serta beberapa aset tetap, aset lainnya dan ekstrakomtabel yang belum dapat kami rinci dalam dokumen ini, dan kesemuanya dalam keadaan baik serta dapat dipergunakan dengan layak sebagai penunjang sarana dan prasarana kegiatan di Dinas Pariwisata Provinsi Banten

Tabel I.4 Anggaran Tahun 2023

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			DPPA REKAPITULASI SKPD	
Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/3.26.0.00.0.00.01.0000/001/2023				
Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata				
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah				
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
		Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	
4	PENDAPATAN DAERAH			
	Jumlah Pendapatan	Rp0	Rp0	
5	BELANJA DAERAH			
5 1	BELANJA OPERASI	Rp44.441.978.200	Rp44.306.796.780	
5 1 01	Belanja Pegawai	Rp14.440.524.000	Rp14.837.963.000	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	Rp30.001.454.200	Rp29.468.833.780	
5 2	BELANJA MODAL	Rp5.199.021.800	Rp4.959.379.720	
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp784.545.000	Rp784.405.000	
5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp4.414.476.800	Rp4.174.974.720	
	Jumlah Belanja	Rp49.641.000.000	Rp49.266.176.500	
	Total Surplus/(Defisit)	(Rp49.641.000.000)	(Rp49.266.176.500)	
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp0	Rp0	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp0	Rp0	
	Pembayaran Neto	Rp0	Rp0	

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam perencanaan dan perjanjian kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Banten tahun 2023 tidak terlepas dari tugas pokok, fungsi dan kewenangan bidang teknis yang saling mengisi dan bersinergi satu sama lain. Hal tersebut mengandung pengertian bahwa bidang teknis memiliki peranan dalam mendukung pelaksanaan kewenangan OPD di bidang Pariwisata.

Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Pilihan, Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan, Unsur penunjang urusan pemerintahan , Unsur pemerintahan umum sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dokumen Renstra pada dasarnya menjabarkan suatu rencana strategis yang erat kaitannya dengan proses menetapkan arah, tujuan dan masa depan yang akan dicapai empat tahun mendatang secara komprehensif untuk mencapai tujuan, mengarahkan pengambilan keputusan serta berbagai tindakan dengan menghubungkan sumber daya dan dana dengan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu institusi pemerintahan. Penjabaran keterkaitan dokumen perencanaan, penyelenggaraan pemerintahan daerah, perangkat daerah, dan pengelolaan keuangan daerah di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tercantum dalam Gambar dibawah ini.

Penyusunan perencanaan dan perjanjian kinerja OPD Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten Tahun 2005-2025 dengan memperhatikan visi, misi, arah kebijakan dan prioritas pembangunan. Selain itu diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten Tahun 2023-2026.

Berdasarkan RPD Provinsi Banten tahun 2023–2026, maka visi dan misi RPD, Sebagaimana Provinsi Banten tahun 2023–2026 adalah:

"BANTEN MANDIRI, MAJU, SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA"

Sementara itu misi Provinsi Banten periode 2023–2026 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas
2. Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan
3. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari

4. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa

2.1 Perencanaan Strategis 2023 – 2026

Sesuai cascade kinerja, Dinas Pariwisata Provinsi Banten mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah untuk meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan yang didukung oleh program sinergitas tata kelola pemerintahan dan peningkatan pertumbuhan pariwisata, Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Dinas Pariwisata Provinsi Banten selama kurun waktu lima tahun adalah:

Tabel 2.1 Sasaran Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2023 – 2026

NO	TUJUAN DAERAH/TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN SASARAN DAERAH				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	70 - 80	70 - 80	70 - 80	70 - 80	70 - 80
2	Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	Meningkatnya Pertumbuhan dan Kontribusi Ekonomi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Domestik dan Asing) (Satuan : Orang)	19.105.640	20.060.922	21.063.968	22.117.167	23.223.025

2.2 Rencana Kinerja 2023

Strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut

Tabel 2.2 Sasaran Strategis dan Arah Kebijakan

VISI : BANTEN MANDIRI, MAJU, SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA			
MISI 2 : Mewujudkan Perekonomian Yang Maju Dan Berdaya Saing Secara Merata Dan Berkeadilan			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	Meningkatnya Pertumbuhan dan Kontribusi Ekonomi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Meningkatkan Penataan dan Pengembangan Destinasi Wisata (Aksesibilitas, Amenitas dan Atraksi)	Peningkatan Penataan dan Pengembangan Kawasan Strategis Untuk Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata,
		Meningkatkan Sarana dan Prasarana dan Akses Pasar Produk Ekonomi Kreatif,	Peningkatan Sarana dan Parasarana serta Kualitas Produk Ekonomi Kreatif
		Meningkatkan Kompetensi Pelaku Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,	Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Pelaku Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Meningkatkan Kualitas dan Memperluas Cakupan Penyebaran Promosi Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Peningkatan Layanan Informasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
MISI 4 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah	tingkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	tingkatkan kualitas pelayanan publik di Dinas Pariwisata	Pemanfaatan teknologi informasi untuk pengelolaan dan pengintegrasian perencanaan, penganggaran dan pengendalian evaluasi pembangunan

Arah Kebijakan Tahunan Dinas Pariwisata Provinsi Banten
Tahun 2023 – 2026

Tabel 2.2.1 Arah Kebijakan

No.	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan Tahunan			
		2023	2024	2025	2026
1	Peningkatan Penataan dan Pengembangan Kawasan Strategis Untuk Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata	1. Penataan dan Pengembangan Destinasi Wisata 2. Peningkatan Kompetensi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)	1. Penataan dan Pengembangan Destinasi Wisata 2. Peningkatan Kompetensi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)	1. Penataan dan Pengembangan Destinasi Wisata 2. Peningkatan Kompetensi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)	1. Penataan dan Pengembangan Destinasi Wisata 2. Peningkatan Kompetensi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)
2	Peningkatan Sarana dan Parasarana serta Kualitas Produk Ekonomi Kreatif	1. Peningkatan Kualitas dan kuantitas promosi pariwisata 2. Perluasan Cakupan Penyebaran Promosi	1. Peningkatan Kualitas dan kuantitas promosi pariwisata 2. Perluasan Cakupan Penyebaran Promosi	1. Peningkatan Kualitas dan kuantitas promosi pariwisata 2. Perluasan Cakupan Penyebaran Promosi	1. Peningkatan Kualitas dan kuantitas promosi pariwisata 2. Perluasan Cakupan Penyebaran Promosi
3	Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Pelaku Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1. Sertifikasi SDM Pariwisata dan ekraf 2. Peningkatan Kemitraan SDM Pariwisata dan Ekraf	1. Sertifikasi SDM Pariwisata dan ekraf 2. Peningkatan Kemitraan SDM Pariwisata dan Ekraf	1. Sertifikasi SDM Pariwisata dan ekraf 2. Peningkatan Kemitraan SDM Pariwisata dan Ekraf	1. Sertifikasi SDM Pariwisata dan ekraf 2. Peningkatan Kemitraan SDM Pariwisata dan Ekraf
4	Peningkatan Layanan Informasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1. Peningkatan Pemasaran dan Kualitas Produk Ekonomi Kreatif	1. Peningkatan Pemasaran dan Kualitas Produk Ekonomi Kreatif	1. Pembangunan Pusat Ruang Kreatif 2. Peningkatan Pemasaran dan Kualitas Produk Ekonomi Kreatif	1. Pembangunan Pusat Ruang Kreatif 2. Peningkatan Pemasaran dan Kualitas Produk Ekonomi Kreatif
5	Pemanfaatan teknologi informasi untuk pengelolaan dan pengintegrasian perencanaan, penganggaran dan pengendalian evaluasi pembangunan	Pemanfaatan teknologi informasi untuk pengelolaan dan pengintegrasian perencanaan, penganggaran dan pengendalian evaluasi pembangunan	Pemanfaatan teknologi informasi untuk pengelolaan dan pengintegrasian perencanaan, penganggaran dan pengendalian evaluasi pembangunan	Pemanfaatan teknologi informasi untuk pengelolaan dan pengintegrasian perencanaan, penganggaran dan pengendalian evaluasi pembangunan	Pemanfaatan teknologi informasi untuk pengelolaan dan pengintegrasian perencanaan, penganggaran dan pengendalian evaluasi pembangunan

Struktur Anggaran Program dan Kegiatan APBP Tahun 2023

Struktur program dan kegiatan APBDP Dinas Pariwisata Provinsi Banten tahun 2023 baik sasaran utama maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut dibawah ini :

Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran 2023

Tabel 2.3 Struktur Program dan Kegiatan APBP Tahun 2023

No	Urusan/ Sasaran /Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	PAGU ANGGARAN		Bertambah/ Berkurang
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1	2	3	4	5
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN BIDANG PARIWISATA			
	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Domestik dan Asing) (Satuan : Orang)	20.060.922	20.060.922	-
I	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	18,615,355,000	19,631,115,200	1,015,760,200
1	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	1,200,000,000	1,816,000,000	616,000,000
	1 Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	1,200,000,000	1,816,000,000	616,000,000
2	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	13,651,000,000	14,111,926,000	460,926,000
	1 Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	500,000,000	448,000,000	52,000,000
	2 Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	7,823,000,000	8,021,820,800	198,820,800
	3 Pengadaan /Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Provinsi	2,800,000,000	2,800,000,000	-
	4 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	2,528,000,000	2,842,105,200	314,105,200
3	Pengelolaan Destinasi Wisata Provinsi	3,114,355,000	3,079,420,300	(34,934,700)
	1 Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	200,000,000	200,000,000	-
	2 Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi	2,914,355,000	2,879,420,300	34,934,700

No	Urusan/ Sasaran /Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	PAGU ANGGARAN		Bertambah/ Berkurang
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1	2	3	4	5
4	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	650,000,000	623,768,900	(26,231,100)
	1 Pembinaan dan Pengawasan Industri Usaha Pariwisata	400,000,000	400,000,000	-
	2 Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	250,000,000	223,768,900	26,231,100
II	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	2,300,000,000	1,940,584,000	(359,416,000)
	1 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	1,700,000,000	1,365,584,000	(334,416,000)
1	1 Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	1,200,000,000	1,057,371,000	142,629,000
	2 Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	500,000,000	308,213,000	191,787,000
	2 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	600,000,000	575,000,000	(25,000,000)
2	1 Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	200,000,000	175,000,000	25,000,000
	2 Fasilitasi Kekayaan Intelektual	200,000,000	200,000,000	-
	3 Perlindungan Hasil Kreativitas	200,000,000	200,000,000	-
III	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	5,295,355,000	4,582,925,100	(712,429,900)
	1 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	5,295,355,000	4,582,925,100	(712,429,900)
1	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri.	1,215,000,000	1,165,037,600	49,962,400
	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	3,580,355,000	2,923,686,500	656,668,500
	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	500,000,000	494,201,000	5,799,000

No	Urusan/ Sasaran /Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	PAGU ANGGARAN		Bertambah/ Berkurang
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1	2	3	4	5
IV	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	3,850,000,000	3,725,617,900	(124,382,100)
1	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	3,350,000,000	3,225,617,900	(124,382,100)
	Pengembangan Kompetensi SDM			
	1 Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	400,000,000	497,109,100	97,109,100
	2 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	1,150,000,000	1,017,508,800	132,491,200
	3 Fasilitas Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	400,000,000	400,000,000	-
	4 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	1,400,000,000	1,311,000,000	89,000,000
2	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	500,000,000	500,000,000	-
	1 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	200,000,000	200,000,000	-
	2 Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	300,000,000	300,000,000	-
Total Anggaran yang Berkaitan Langsung dengan Pencapaian Sasaran		30,060,710,000	29,880,242,200	(180,467,800)

Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2023

No	Urusan/ Sasaran /Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	PAGU ANGGARAN		Bertambah/ Berkurang
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	19,580,290,000	19,385,934,300	(194,355,700)
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	118,240,000	84,529,000	(33,711,000)
1	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60,000,000	40,263,000	19,737,000
1	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5,000,000	5,000,000	-
1	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5,000,000	5,000,000	-
1	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5,000,000	5,000,000	-
1	5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5,000,000	5,000,000	-
1	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18,240,000	3,990,000	14,250,000
1	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20,000,000	20,276,000	276,000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14,472,024,000	14,869,463,000	397,439,000
2	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13,840,524,000	14,395,598,000	555,074,000
2	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	600,000,000	442,365,000	157,635,000
2	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6,000,000	6,000,000	-
2	4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	6,000,000	6,000,000	-
2	5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3,000,000	3,000,000	-
2	6 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	6,000,000	6,000,000	-
2	7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	6,000,000	6,000,000	-
2	8 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4,500,000	4,500,000	-

No	Urusan/ Sasaran /Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	PAGU ANGGARAN		Bertambah/ Berkurang
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1	2	3	4	5
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2,000,000	2,000,000	-
	1 Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	500,000	500,000	-
	2 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	500,000	500,000	-
	3 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	500,000	500,000	-
	4 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	500,000	500,000	-
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	207,000,000	46,875,000	(160,125,000)
4	1 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	500,000	500,000	-
	2 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	500,000	500,000	-
	3 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	150,500,000	500,000	150,000,000
	4 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15,000,000	15,000,000	-
	5 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40,500,000	30,375,000	10,125,000
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	965,393,000	771,729,870	(193,663,130)
	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9,634,000	9,634,000	-
	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	344,145,000	306,696,170	37,448,830
	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10,000,000	19,697,200	9,697,200
	4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24,114,000	27,114,000	3,000,000
	5 Fasilitasi Kunjungan Tamu	106,500,000	88,312,500	18,187,500
	6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	465,000,000	314,276,000	150,724,000

No	Urusan/ Sasaran /Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	PAGU ANGGARAN		Bertambah/ Berkurang
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1	2	3	4	5
7	7 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5,000,000	5,000,000	-
	8 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1,000,000	1,000,000	-
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,574,630,000	2,618,511,230	43,881,230
1	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	471,630,000	468,800,630	2,829,370
	2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2,103,000,000	2,149,710,600	46,710,600
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,241,003,000	992,826,200	(248,176,800)
1	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	230,000,000	229,668,200	331,800
	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	160,003,000	159,030,000	973,000
3	3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	120,000,000	98,128,000	21,872,000
	4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	731,000,000	506,000,000	225,000,000
Total Anggaran Pendukung		19,580,290,000	19,385,934,300	(194,355,700)

2.3 Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten yang merepresentasikan kinerja instansi, sebagai berikut :

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Pertumbuhan dan Kontribusi Ekonomi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Domestik dan Asing) (Satuan : Orang)	Orang	20.060.922	Tercapai pada TW IV
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai	80	Tercapai pada TW IV

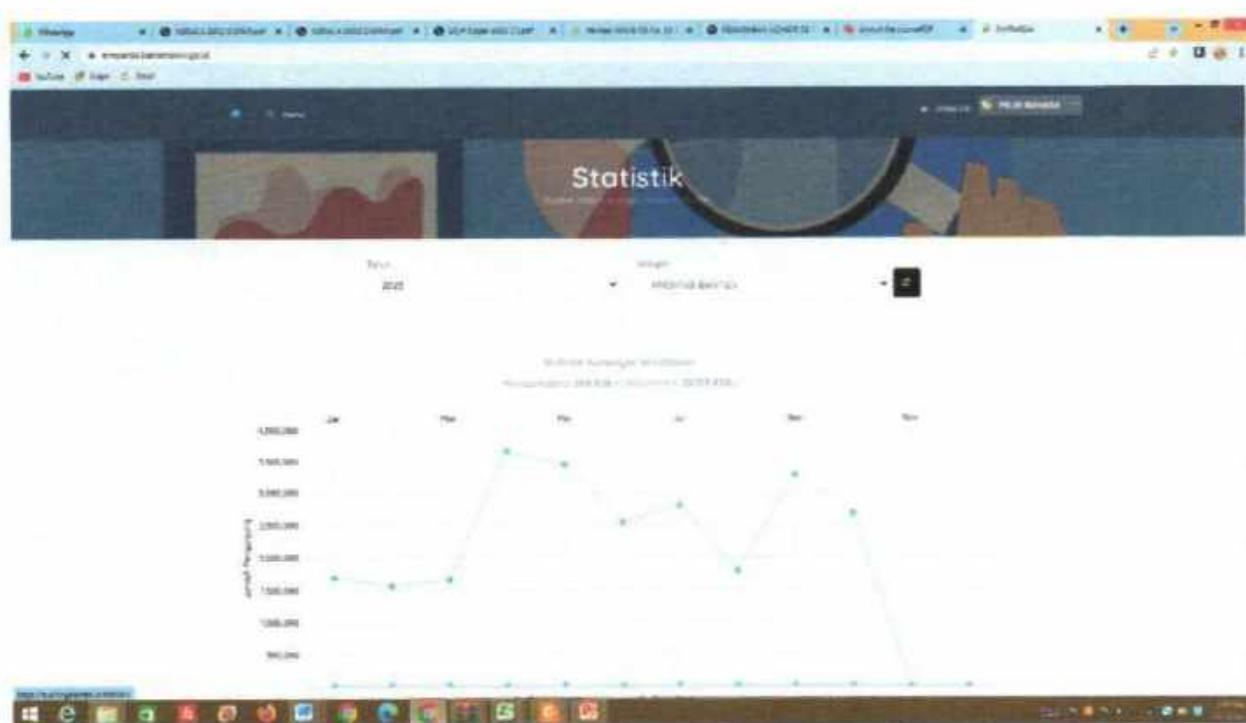
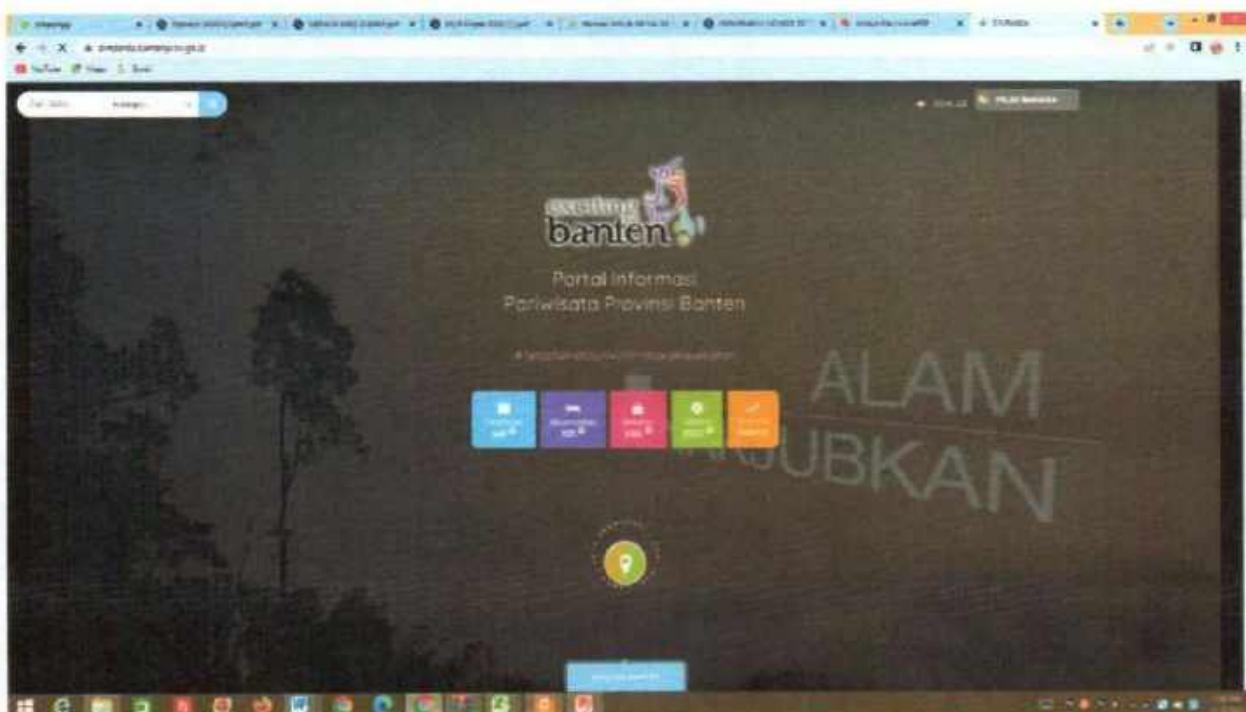
Keterangan : 1. Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.
 2. Pencapaian sasaran strategis diatas didukung oleh program dan kegiatan

Program RPJMD	Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019 dan Pemutakhirannya	Anggaran (Rp)
Program Peningkatan Daya Tarik Wisata	Program Peningkatan Daya Tarik Wisata	19,631,115,200
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Perlindaungan Hak Kekayaan Intelektual	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Perlindaungan Hak Kekayaan Intelektual	1,940,584,000
Program Pemasaran	Program Pemasaran	4,582,925,100
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	3,725,617,900
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19,385,934,300
Jumlah Anggaran		49,266,176,500

Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Banten adalah aplikasi Simparda.bantenprov.go.id yang mengintegrasikan perhitungan jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara.

Gambar 2.5 Sistem Informasi Manajemen Pariwisata Daerah



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2023

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat memberikan gambaran mengenai akuntabilitas pelaksanaan program kegiatan pembangunan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif pada tahun anggaran 2023

PENGUKURAN KINERJA

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Capaian kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Banten diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan yang terdapat dalam Rencana Kerja

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran. Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan yang terdiri dari *Input, Output, Outcome*.

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kinerja Penilaian Realisasi Kinerja	Kode / Warna
1	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5	$\leq 50 S$	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

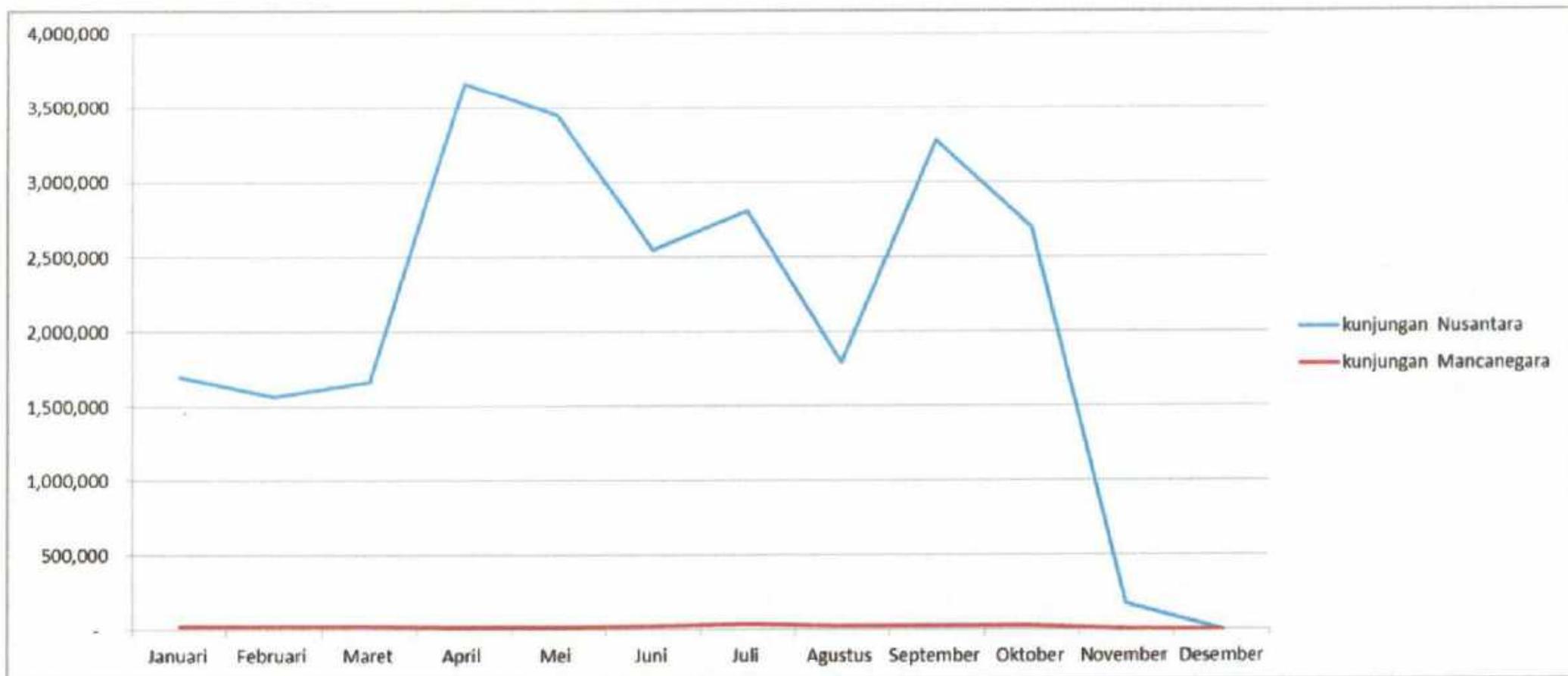
3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Sasaran / Program 1	Indikator Kinerja Program RPJMD (Outcome) 2	Target 3	Realisasi Capaian Target RPJMD Provinsi Melalui Pelaksanaan RKPD 4	Tingkat Capaian Target RPJMD Provinsi Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi 5	SKPD Penanggung Jawab 6	Bidang Urusan 7
			2023 3	2023 4		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	80	81,23	101.54 %	Dinas Pariwisata Provinsi Banten	Kepala Dinas
Meningkatnya Pertumbuhan dan Kontribusi Ekonomi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Domestik dan Asing)	20.060.922	25.664.013	127.93 %		
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	100 %	100 %		Sekretaris
Program Peningkatan Daya Tarik Wisata Provinsi	Persentase Penataan dan Pengembangan Destinasi Wisata	100 %	100 %	100 %		Bidang Pengembangan Daya Tarik Wisata
	Rata-Rata Lama inap	1,66 Hari	1.50 Hari	93.75 %		
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan	Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan (Rp. 4998799,05)	4998799,05	2.347.107	46.95 %		Bidang Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual						
Program Pemasaran	Persentase Jumlah Promosi Wisata (100 %)	100 %	100 %	100 %		Bidang Pemasaran Produk Pariwisata
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM yang memiliki Sertifikat di Sektor Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif (100 %)	100 %	100 %	100 %		Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

sasaran pertama kurun waktu Januari – Desember 2023 sebagai berikut :

JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN



Jumlah kunjungan wisatawan di tahun 2023 pada awal bulan desember memiliki penurunan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, hal ini disebabkan belum memasukinya masa libur bersama (*peak season*) pada hari libur Natal dan Tahun Baru, dimana jika melihat dari tahun ke tahun umumnya akan mengalami peningkatan secara signifikan, namun begitu jumlah kunjungan wisatawan telah melebihi target 127.93 %

Program Peningkatan Daya Tarik Wisata Provinsi

Program kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang ini memiliki peran penting terhadap peningkatan daya saing pariwisata di Banten terutama dalam pemenuhan aspek strategis dalam penataan dan pengembangan destinasi pariwisata meliputi ; amenitas, atraksi dan aksesibilitas sebagai penopang dalam peningkatan kunjungan wisatawan.

Fokus pembangunan daya tarik kepariwisataan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Banten di tetapkan pengembangan kawasannya berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi (Ripparprov) sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2019.

Melalui pengembangan daya tarik yang terstruktur ini diharapkan pengembangan pariwisata dapat berjalan dan berkelanjutan (sustainable program) melalui pengembangan kawasan strategis pariwisata provinsi (KSPP) dan kawasan pengembangan pariwisata provinsi (KPP) serta destinasi pariwisata provinsi (DPP)

Sebagai lokomotif dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan pariwisata di Provinsi Banten, pada tahun 2023 Bidang pelaksana kegiatan ini yang menaungi 4 (empat) kegiatan yaitu :

1. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi
2. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
3. Pengelolaan Destinasi Wisata Provinsi
4. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

Telah berhasil melaksanakan kegiatan penataan dan pengembangan daya tarik wisata dengan persebaran destinasi yang mengacu Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi (Ripparprov) dengan target dan realisasi indikator sasaran program sebagaimana tabel dibawah ini :

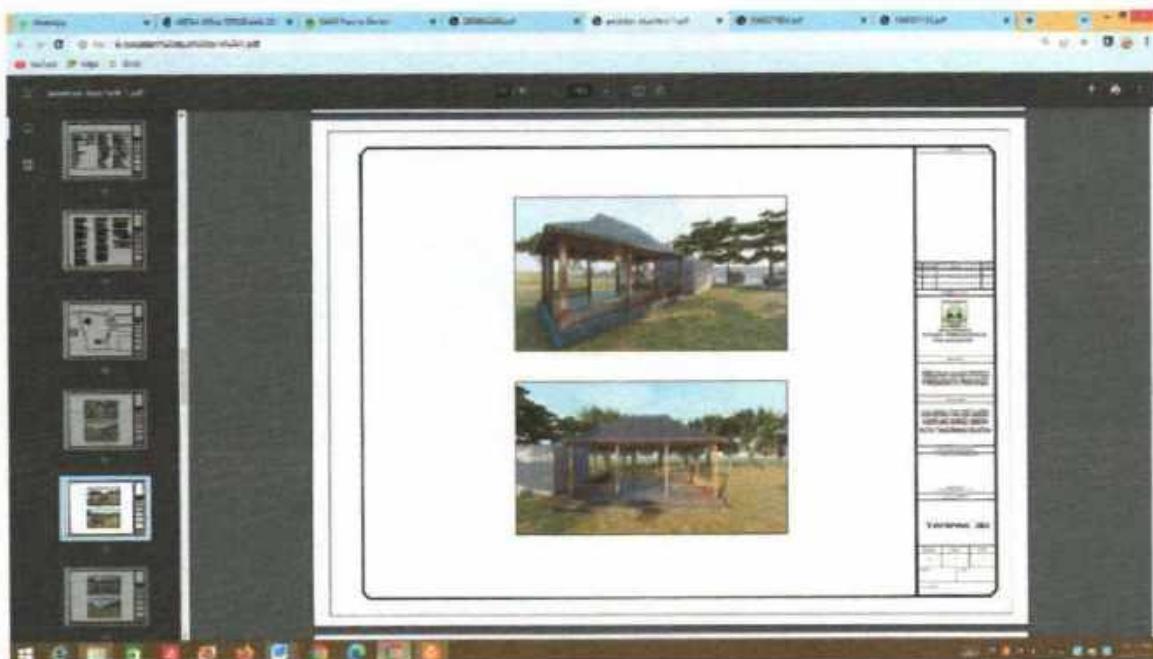
Capaian Target dan Realisasi 2023

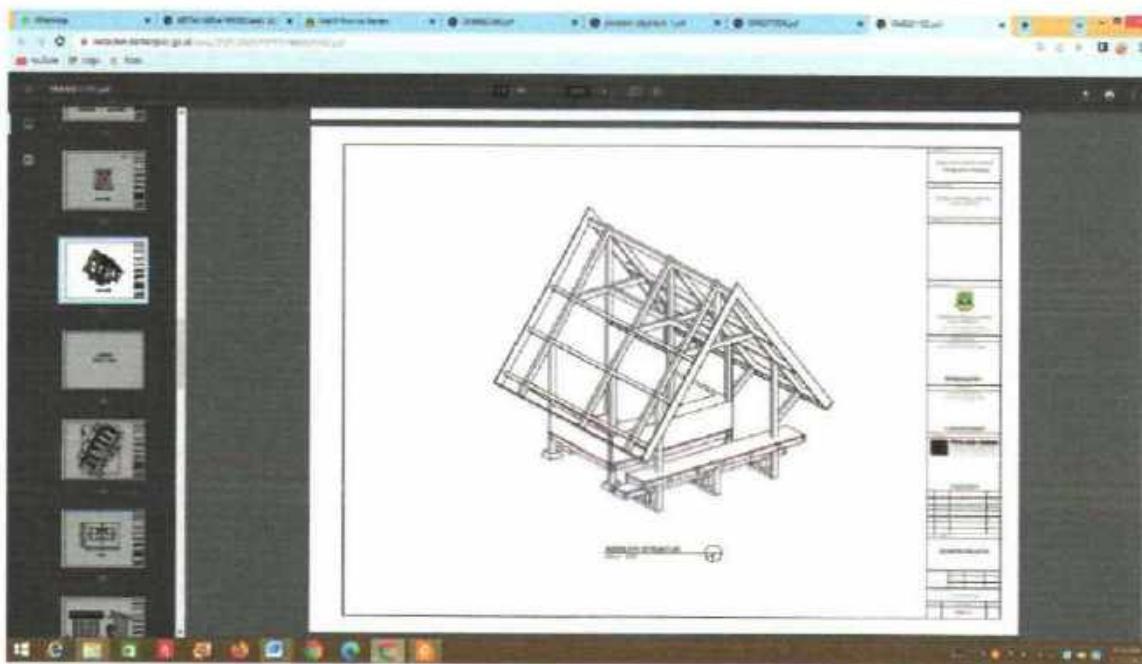
Nama Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Program Peningkatan Daya Tarik Wisata Provinsi	Persentase Penataan dan Pengembangan Destinasi Wisata	20	20 %	100 %
	Rata-Rata Lama inap	1,66 Hari	1.50 Hari	90.36 %

Adapun keberhasilan penataan dan pengembangan destinasi pariwisata ditunjang dengan adanya pengembangan kawasan strategis pariwisata provinsi (KSPP) yang disusun dalam rencana induk pengembangan pariwisata provinsi (Ripparprov) sehingga memudahkan PPTK melakukan rencana pengembangan berdasarkan roadmap dalam dokumen tersebut.

Dalam upaya menuju pencapaian sasaran program tersebut berikut beberapa aktivitas / kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka pengembangan destinasi wisata di Provinsi Banten diantaranya ;

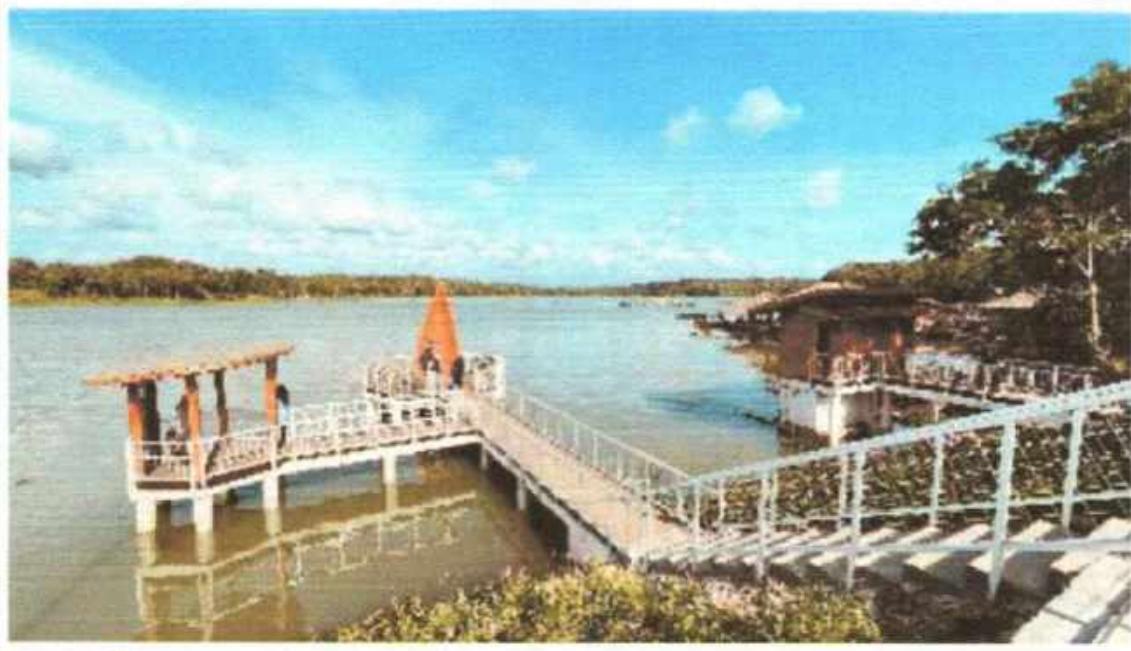
1. Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi yang dipusatkan pada cluster wilayah pengembangan strategis dengan total 13 pengembangan lokasi KSPP berjalan dengan realisasi 100 % melalui penataan penyediaan detail rencana kawasan sebagai berikut :



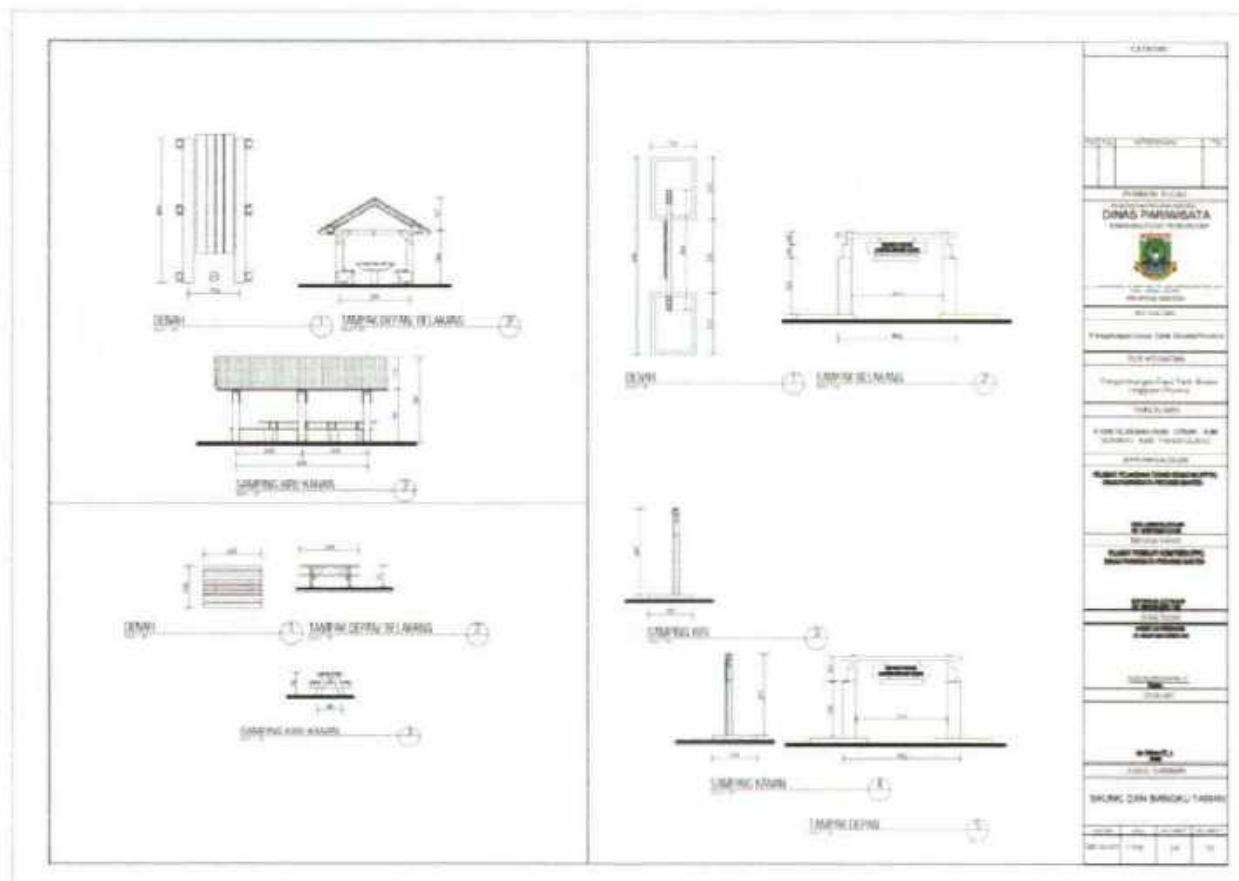


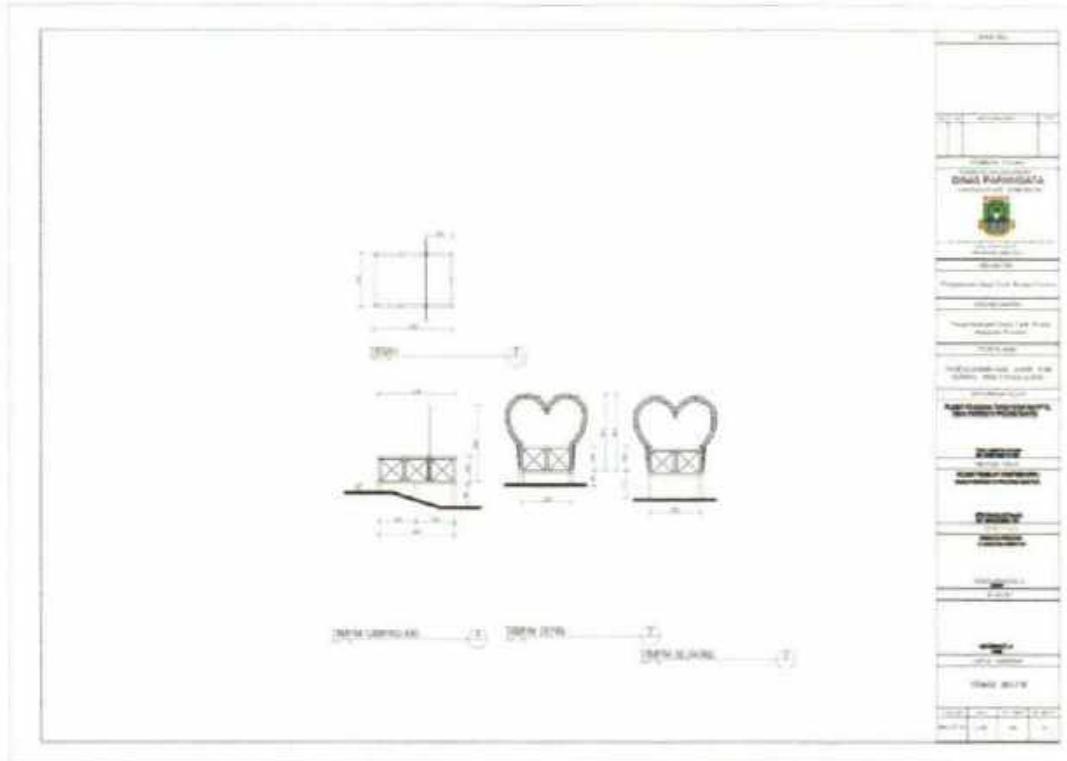
2. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi telah melakukan penyusunan terhadap 4 Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi dengan capaian 100 % melalui penataan dan pengembangan kawasan kawasan sebagai berikut :





3. Pengelolaan Destinasi Wisata telah melakukan penyusunan terhadap 2 Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi dengan capaian 100 % melalui penataan dan pengembangan kawasan kawasan sebagai berikut





4. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi telah melakukan 3 kali pembinaan dan fasilitasi standarisasi industri kepada 24 usaha industri dengan capaian 100 % melalui pembinaan dan fasilitasi sebagai berikut :

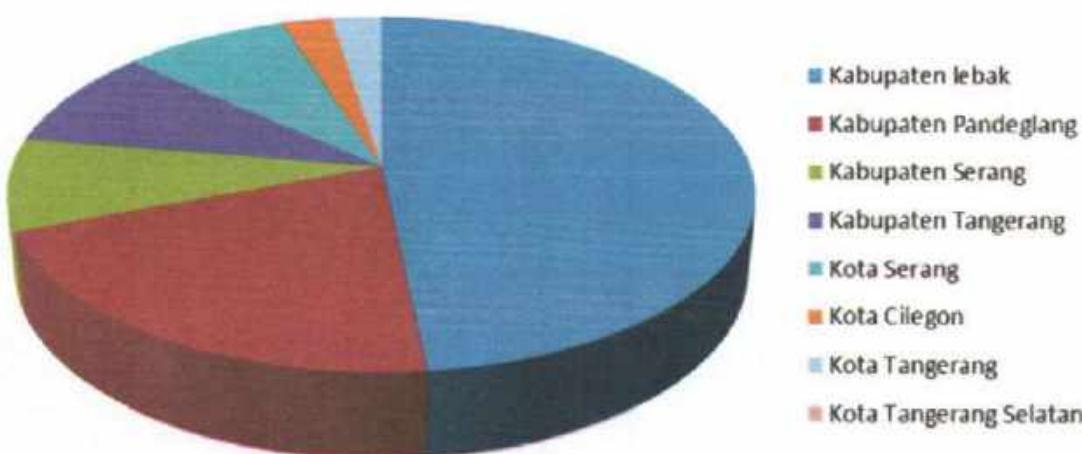
DOKUMENTASI SOSIALISASI HAKI OLEH KONSULTAN HAKI



Seluruh kegiatan pada program Peningkatan Daya Tarik Wisata Provinsi ditujukan untuk mencapai target sasaran program yaitu penataan dan pengembangan destinasi wisata dengan target 20 % setiap tahunnya, hasil pengembangan sebaran kegiatannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

PENATAAN DESTINASI PARIWISATA

DESTINASI WISATA



Data pengembangan destinasi di 8 Kab/Kota

Berdasarkan data diatas dapat kita simpulkan bahwa perkembangan destinasi lebih dominan di kasawan strategis wilayah Kabupaten Lebak. Berdasarkan rencana dan realisasi pengembangan pada tahun 2022 telah dibangun sebanyak 58 lokasi sementara untuk tahun 2023 pengembangan yang dilakukan di KSPP Banten sebanyak 13 Kawasan sehingga rencana pengembangan 20 % untuk tahun ini tercapai sebanyak 20 % sehingga pencapaian penataan destinasi menjadi **100 %** dengan predikat "Sangat Baik"

Sehingga target capaian pada penataan dan pengembangan destinasi pariwisata provinsi banten sebesar 100 %. Faktor dominan penunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut adalah adanya komunikasi dan persepsi yang sama antara pemangku kepentingan dalam mengembangkan daya tarik unggulan di masing – masing daerah yang terlihat dengan adanya permohonan administratif bantuan dari masing – masing kelompok sadar wisata (pokdarwis) di Provinsi Banten.

TPK Hotel non bintang pada November 2023 sebesar 21,99 persen atau naik 4,44 poin dibandingkan Oktober 2023 yang tercatat 17,55 persen. Kenaikan TPK ini disebabkan oleh naiknya penghunian kamar pada hampir seluruh kelas kelompok kamar kecuali kelas kelompok kamar 25-40 yang justru mengalami penurunan yaitu sebesar 1,09 poin.

Tabel 2 TPK Hotel Non Bintang di Banten, November 2023

Klasifikasi Hotel	TPK (%)			Perubahan November '23 thd November '22 (poin)	Perubahan November '23 thd Oktober '23 (poin)
	November 2022	Oktober 2023	November 2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kelompok Kamar <10	6,49	9,64	13,55	7,06	3,91
Kelompok Kamar 10-24	10,38	14,61	20,54	10,16	5,93
Kelompok Kamar 25-40	25,29	24,52	23,43	-1,86	-1,09
Kelompok Kamar >40	17,81	20,35	26,32	8,51	5,97
TPK Non Bintang	14,72	17,55	21,99	7,27	4,44

TPK tertinggi untuk hotel non bintang terjadi pada hotel dengan kelompok kamar >40 yaitu sebesar 26,32 persen, sedangkan TPK hotel non bintang yang terrendah sebesar 13,55 persen terjadi pada hotel dengan kelompok kamar <10.

2. Rata-Rata Lama Menginap Tamu (RLMT) Hotel Berbintang

Pada bulan November 2023, RLMT gabungan (asing dan Indonesia) pada hotel bintang di Banten tercatat sebesar 1,50 hari atau sama dengan kondisi pada bulan Oktober 2023. Dilihat dari asal tamu hotel, terjadi penurunan sebesar 0,04 poin pada RLMT Indonesia dan kenaikan 0,29 poin pada RLMT Asing. Dirinci lebih lanjut menurut klasifikasi hotel, pada November 2023 kenaikan RLMT gabungan terjadi pada kelas hotel bintang satu, dua dan tiga, dengan kenaikan terbesar terjadi pada kelas hotel bintang dua yaitu sebesar 0,18 poin. Di lain sisi, penurunan RLMT gabungan terbesar terjadi pada kelas hotel bintang empat yaitu sebesar 0,26 poin. Sementara itu, dibandingkan dengan bulan yang sama tahun lalu, RLMT gabungan mengalami kenaikan 0,16 poin dari sebelumnya sebesar 1,34 hari.

Tabel 3 Rata-rata Lama Menginap Tamu Hotel Bintang di Banten, November 2023

Klasifikasi RLMT	RLMT			Perubahan November '23 thd November '22 (poin)	Perubahan November '23 thd Oktober '23 (poin)
	November 2022	Oktober 2023	November 2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
RLMT Asing	1,89	1,43	1,72	-0,17	0,29
RLMT Indonesia	1,33	1,52	1,48	0,15	-0,04
RLMT Asing+Indonesia	1,34	1,50	1,50	0,16	0,00

Berdasarkan berita resmi statistik BPS Perwakilan Banten yang disampaikan informasi perkembangan terkait rata – rata lama menginap tamu (asing dan nusantara) di Provinsi Banten untuk s.d Bulan November 2023 terhitung 1.50 hari sehingga target capaian dari 1.66 hari adalah sebesar 90.36 %. dengan predikat "Tinggi"

Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Program kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini memiliki peran penting terhadap peningkatan Pelaku Industri pariwisata yang profesional dalam pemenuhan kapasitas dan kapabilitas industri pariwisata dan ekonomi kreatif meliputi ; fasilitasi dan pembinaan industri pariwisata dan ekonomi kreatif.

Fokus bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini diarahakan kepada pendukungan pengembangan pariwisataan sebagaimana yang telah di tetapkan dalam rencana pengembangan kawasannya berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi (Ripparprov) sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2019.

Melalui kegiatan ini diharapkan bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dapat unggul dan berdaya saing dalam menapaki dunia kepariwisataan. Bidang pelaksana kegiatan ini pada tahun 2023 menaungi 2 (dua) kegiatan yaitu :

1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif
2. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif

Bidang ini telah berhasil melaksanakan pembinaan dan pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif, dengan rencana dan realisasi capaian indikator sasaran program sebagaimana tabel dibawah ini :

Capaian Target dan Realisasi 2023

Nama Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan (Rp. 4998799,05)	4998799,05	2.347.107	46.95 %

Terinformasikan bahwa capaian 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 terkait pencapaian Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan mengalami peningkatan pengeluaran sebesar Rp. 454.579 dibandingkan tahun 2022 sehingga capaian kinerja 2023 adalah 46.95 %.

Keterangan :

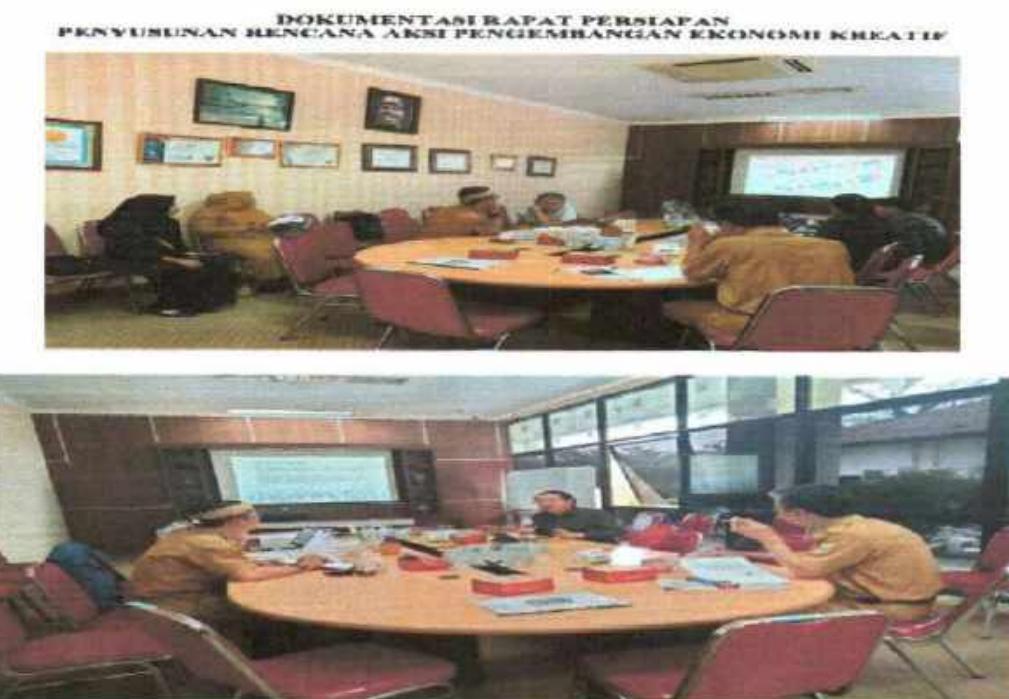
Rata – rata pengeluaran di dapat dari Buku Neraca Satelit Pariwisata Daerah yang diterbitkan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Banten TA. 2023

Berikut kegiatan yang dilakukan dalam upaya menuju pencapaian sasaran program tersebut berikut beberapa aktivitas / kegiatan yang telah dilakukan yaitu ;

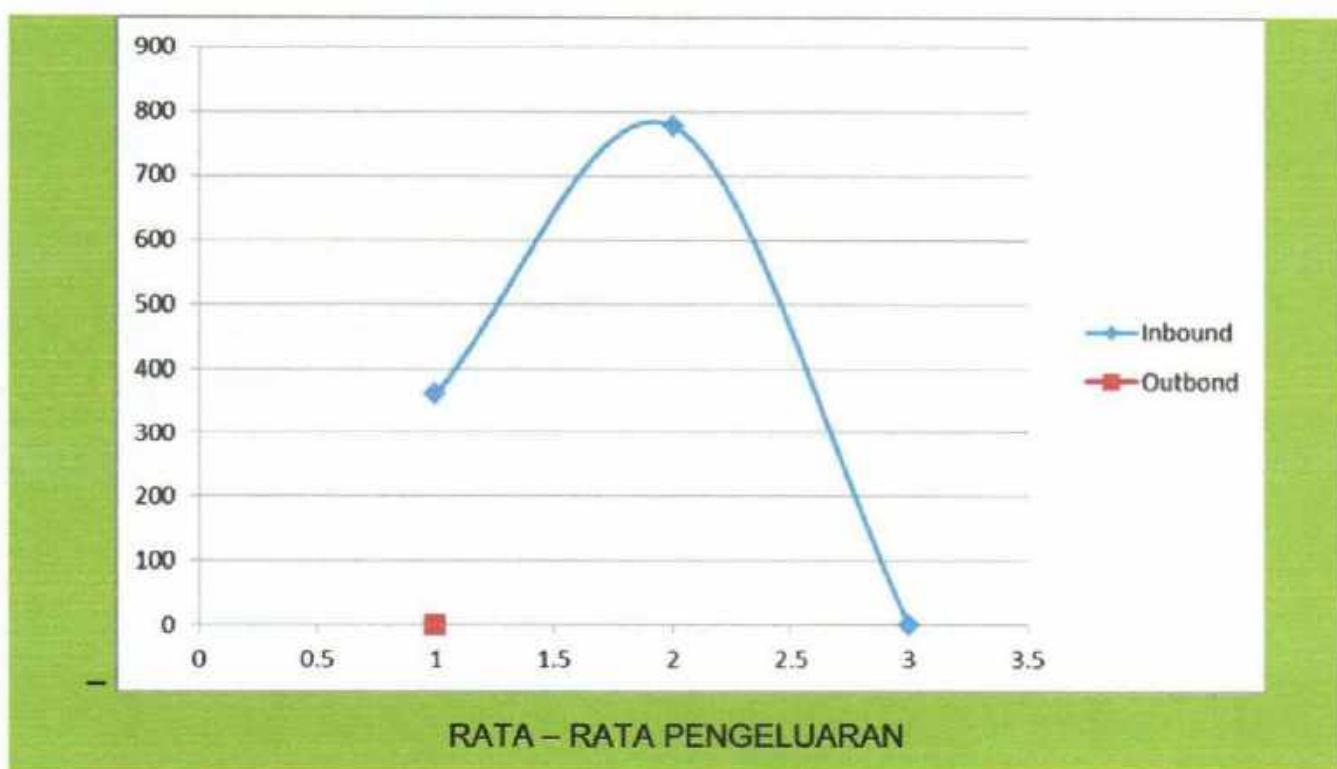
1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang dipusatkan pada cluster wilayah pengembangan strategis dengan total 6 unit ketersiapan sarana dan prasarana kota kreatif di Provinsi Banten telah dilaksanakan dengan baik dengan capaian realisasi 100 % dengan keterangan sebagai berikut :



2. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif yang dilaksanakan guna menunjang ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai bagi para pelaku ekonomi kreatif dengan target 1 Dokumen telah terlaksana dengan capaian realisasi mencapai 100%



pencapaian output program Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual selaras dengan indikator kinerja utama yaitu rata – rata pengeluaran, berikut kami tampilkan target pencapaian atas kinerja tersebut :



Berdasarkan data diatas dapat diperoleh informasi bahwa rata – rata

pengeluaran wisatawan yang terdiri dari 2 komponen yaitu :

1. Wisatawan Inbound
2. Wisatawan Outbond

Dimana konsultan PT Sketsa Negeri Mandiri telah melakukan penyusunan dokumen neraca satelit pariwisata daerah (Nesparda) Dinas Pariwisata Provinsi Banten TA. 2023 yang diperoleh dari pengolahan data primer hasil survey 2022, data studi literatur Nesparda 2015 dan 2021 serta simulasi dan perhitungan matematis diperoleh hasil Dampak belanja pariwisata di Provinsi Banten pada tahun 2022 dengan rata-rata sebesar **Rp. 2.347.107,-** pada tahun 2022 (yang dilaporkan pada dokumen Nesparda 2023)

Sehingga target pengeluaran rata – rata wisatawan (nusantara dan mancanegara) berdasarkan target sebesar **Rp. 4998799,05** tercapai hanya **Rp.2.347.107,-** sehingga jika dihitung prosentasenya tercapai **46.95 %** dengan predikat “**sangat rendah**”

Program Pemasaran

Program kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang Pemasaran ini memiliki peran penting terhadap peningkatan promosi, kunjungan wisatawan (nusantara dan mancanegara) serta investasi di Provinsi Banten. Kegiatan ini meliputi ; sarana dan prasarana promosi, fasilitasi event dalam dan luar daerah serta aktivitas promosi media sosial kekinian sebagai sarana untuk memperkenalkan daya tarik wisata di Provinsi Banten.

Fokus pembangunan pariwisata diarahkan kepada wisatawan nusantara dan mancanegara melalui pemanfaatan potensi dan daya tarik yang dimiliki dan diarahkan untuk meingkatkan perekonomian di Banten sebagaimana yang telah di tetapkan dalam rencana pengembangan kawasannya berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi (Ripparprov) sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2019.

Bidang Pemasaran ini telah berhasil melaksanakan pengembangan promosi pariwisata dengan rencana dan realisasi capaian indikator sasaran program sebagaimana tabel dibawah ini :

Capaian Target dan Realisasi 2023

Nama Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (%)	Capaian (%)
Program Pemasaran	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan	5	5.34	106.75
	Prosentase jumlah promosi wisata	100	100	100

Terinformasikan bahwa capaian 2023 terhadap persentase pertumbuhan jumlah wisatawan di tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0.43 % sehingga capaian target dan realisasi 2023 adalah 106.75 % sementara untuk persentase jumlah wisata tetap 100 %

Terinformasikan bahwa capaian 2023 terhadap persentase pertumbuhan jumlah wisatawan periode akhir renstra 2026 mengalami peningkatan 0.43 % sehingga capaian persentase pertumbuhan jumlah wisatawan terhadap akhir renstra 2026 adalah 106.75 % sementara untuk persentase jumlah wisata tetap 100 %

Keterangan :

Rata – rata pertumbuhan wisatawan ini diukur dari selisih target dan realisasi kunjungan yang kemudian dikonversi hasilnya menjadi persentase (%)

Berikut kegiatan yang menunjang pencapaian terhadap pertumbuhan kunjungan wisatawan serta prosentase jumlah promosi wisata diharapkan kunjungan wisatawan maupun kerjasama antar stakeholder (B2B) dapat terealisasi dengan optimal. Guna mendukung target capaian tersebut bidang pemasaran pada tahun 2023 memiliki 1 kegiatan yaitu :

1. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi

Dalam upaya menuju pencapaian sasaran program tersebut berikut beberapa aktivitas / kegiatan yang telah dilakukan diantaranya ;

LAPORAN KEGIATAN PODCAST
(PROMOSI BERBASIS DIGITALISASI)

DOKUMENTASI



Tema
Tempat
Waktu Penayangan
Kanal YouTube
Host
Narasumber

"Wisata Tematik yang Asik? Ya #diBantenaja"
Studio Teras EBB – Bidang Pemasaran, Dinas
Pariwisata Provinsi Banten
31 Mei 2023
Visit Banten
Divia Efandari
1. Kapala Dinas Pariwisata Provinsi Banten
2. Pengelola Kampung Agrowisata Agrinex
3. Pengelola Elite Park Mini Zoo

Pembahasan

- a. Pengembangan Destinasi Wisata oleh Dinas
Pariwisata Provinsi Banten pada Tahun 2023,
pengembangan kompetensi SDM Parekraf serta
pengembangan industri parekraf Provinsi
Banten Tahun 2023
- b. Profil Kampung Agrowisata Agrinex,
pengembangannya dan kontribusinya terhadap
sektor pariwisata Banten
- c. Profil dan pengembangan Elite Park Mini Zoo
serta kontribusinya terhadap sektor pariwisata
Banten
- d. Ajakan untuk berswafoto #diBantenaja

DOKUMENTASI

- Cetak Visual Branding Mobil Pariwisata Banten

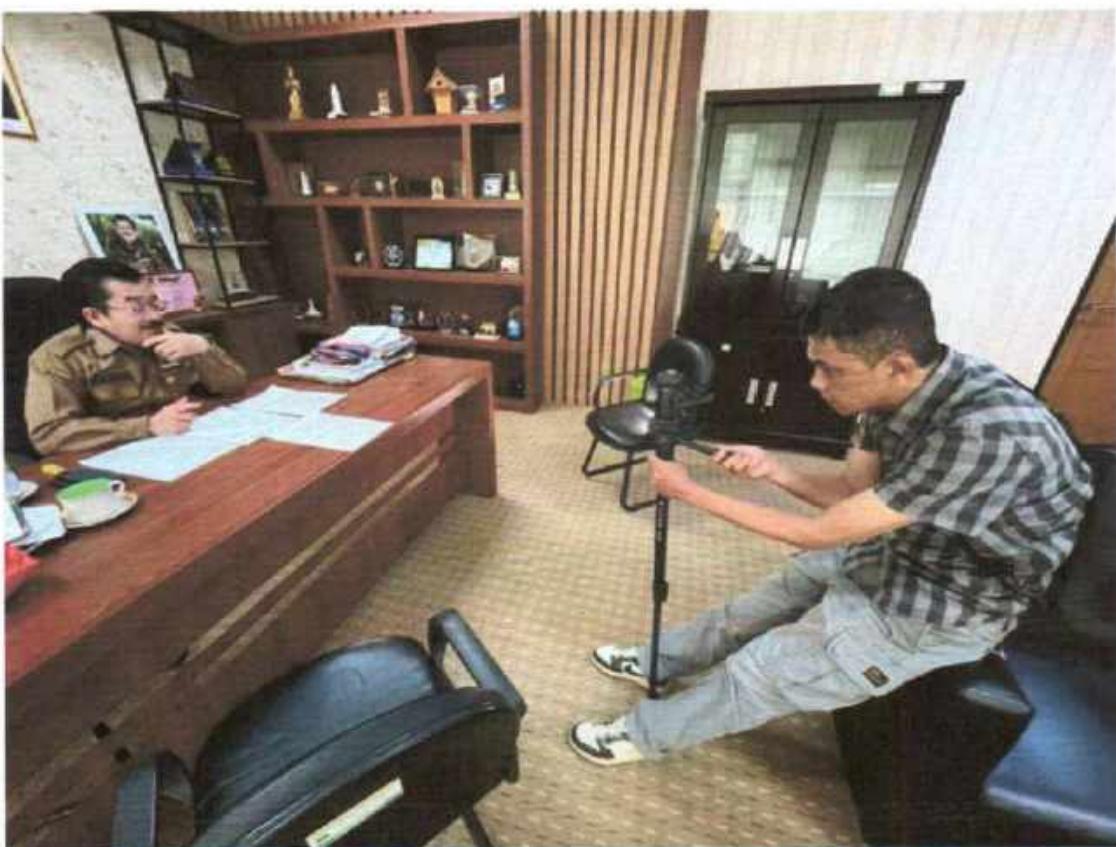


- Sewa Billboard di Keraton Kesultanan Banten



9

TIM OCS
Online Campaign Sosial



Seluruh kegiatan pada program Pemasaran dilaksanakan dalam rangka mencapai 5 dokumen event kegiatan promosi wisata dimana pada tahun 2023 target tersebut sudah tercapai sehingga capaian programnya mencapai 100 % hasil pengukurannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Gambar 3.2.3 I



Kegiatan promosi event yang dilaksanakan oleh Program Pemasaran Pariwisata di Bidang Pemasaran pada Tahun 2023 telah melakukan sebanyak 4 kali (dokumen) pelaksanaan promosi pariwisata yang terdiri dari :

1. Promosi Media Cetak
2. Promosi Media Elektronik
3. Fasilitasi Event
4. Branding Promo

Seluruh kegiatan promosi ini ditujukan untuk menunjang kegiatan pengembangan daya tarik (destinasi) pariwisata yang ada di Provinsi Banten. Penyebaran event kegiatan promosi difokuskan pada pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP) yang didasarkan pada rencana induk pengembangan pariwisata provinsi (Ripparprov).

Sementara target promosi di tahun 2023 pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten adalah sebesar 5 % dari 4 event promosi sehingga capaian **100 %** dengan predikat **“Sangat Baik”**

Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Program kegiatan ini dilaksanakan oleh bidang SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, program ini memiliki peran penting terhadap peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Provinsi Banten. Kegiatan ini meliputi ; Pemberian sertifikat, peningkatan peran masyarakat dalam rangka pengembangan kemitraan pariwisata dan fasilitasi pengembangan kompetensi pariwisata dan ekonomi kreatif.

Fokus pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diarahkan kepada wisatawan sumber daya manusia di Provinsi Banten. Pelaksanaannya sesuai amanat perundang – undangan dimana SDM yang diberikan pembekalan maupun pelatihan adalah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang tingkat lanjutan dimana bagi SDM yang baru harus melalui tahapan pembinaan dan pelatihan di Dinas Pariwisata Kab/Kota sehingga pemanfaatan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dan perekonomian masyarakat di Banten sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana pengembangan kawasannya berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi (Ripparprov) sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2019.

Capaian Target dan Realisasi 2023

Nama Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (%)	Capaian (%)
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM yang memiliki Sertifikat di Sektor Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif	1.644	1.644	100

Terinformasikan bahwa capaian 2023 terhadap persentase SDM yang memiliki sertifikat di sektor kepariwisataan dan ekonomi kreatif mencapai 100 % dari yang ditargetkan di 2023

Berikut kegiatan – kegiatan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menjadi profesional dan mandiri serta mampu menjadi pelopor bagi masyarakat disekitar destinasi / kawasan pariwisata untuk bersama – sama mengembangkan potensi wisatanya. Adapun kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian tersebut adalah :

1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
2. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif

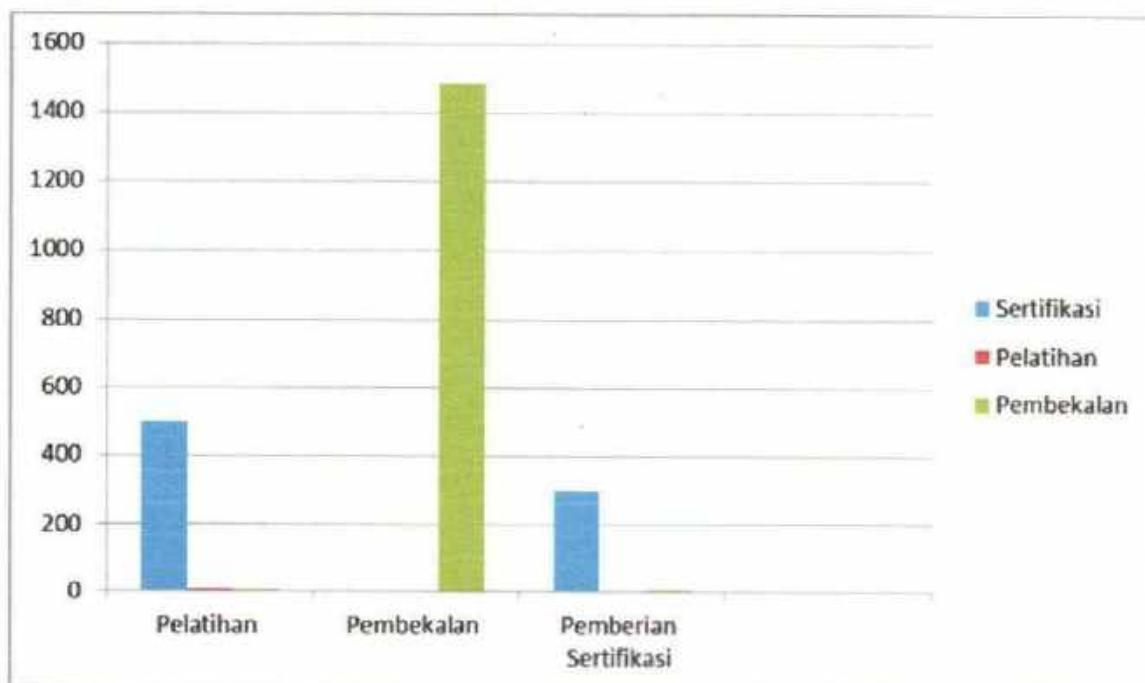
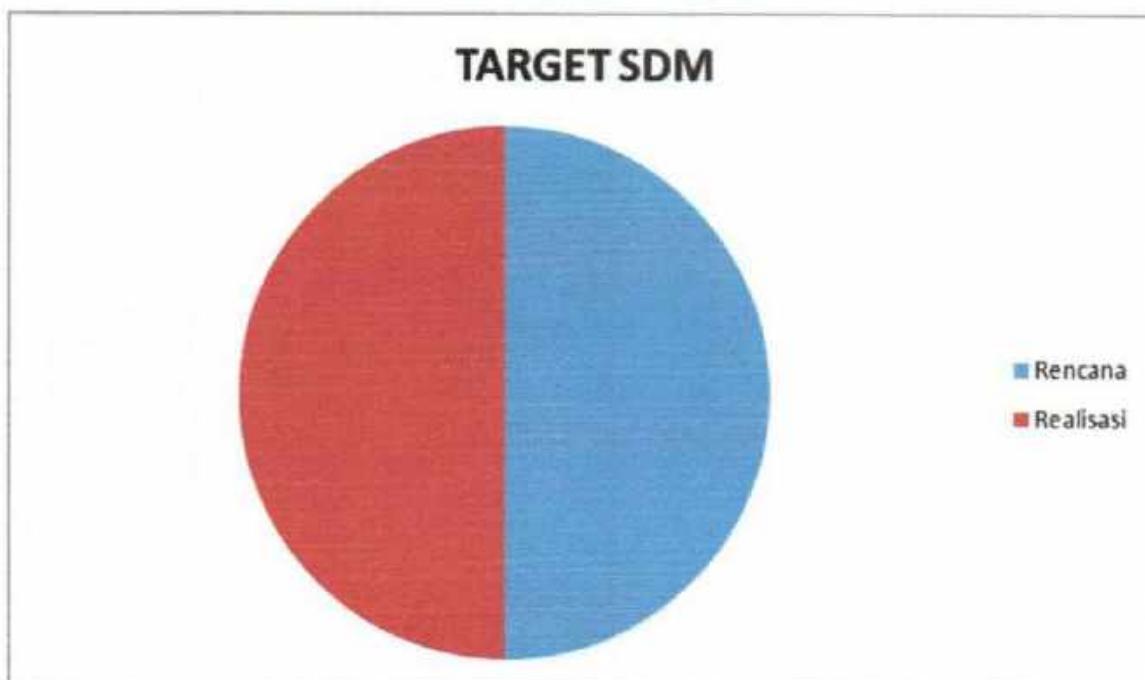
Dalam upaya menuju pencapaian sasaran program tersebut berikut beberapa aktivitas / kegiatan yang telah dilakukan yaitu ;



Laporan Apresiasi Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif Sub Sektor Pengembang Permainan (1) Tahun 2023

**Dokumentasi Apresiasi Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif Sub Sektor Pengembang Permainan
Tahun 2023**



Share Kontribusi Kegiatan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**TARGET DAN RENCANA PENGEMBANGAN SDM**

Berdasarkan share kontribusi dan penargetan SDM di Tahun 2023 bahwa pencapaian indikator sasaran dengan target 2285 pelaku SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang terbina telah tercapai sehingga capaian kinerjanya mencapai **100 %** dengan predikat "Sangat Baik"

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Terselenggarakan program penunjang urusan pemerintahan daerah ditopang oleh kegiatan – kegiatan dan sub – sub kegiatan yang dilaksanakan oleh sekretariat guna mendukung terlaksananya penyelenggaraan administrasi umum, perencanaan dan pengelolaan keuangan di Dinas Pariwisata Provinsi Banten.

Sekretaris Dinas selaku PPTK pada program penunjang urusan pemerintahan daerah telah nyata – nyata melakukan peran kelembagaannya yang berfungsi sebagai kooordinasi, konsultasi kepada masing – masing bidang dilingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Banten.

Ketersediaan pelayanan umum, administrasi kepegawaian, perencanaan hingga pengelolaan anggaran keuangan lembaga / dinas yang baik di tahun 2023, hal ini membantu para PPTK hingga staf di Dinas Pariwisata Provinsi Banten dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik tanpa mengkhawatirkan tentang keperluan dan kelengkapan pelaksanaan kegiatannya.

dirasa wajar jika ketercapaian kinerja program ini sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan pengukuran kinerja SAKIP Dinas Pariwisata Provinsi Banten dengan bobot nilai 81.25 dengan kategori A (Memuaskan) dengan asumsi seluruh penyelenggaraaan sebagaimana keterangan diatas telah dipenuhi

Dalam upaya peningkatan capaian kinerja SAKIP, Sekretariat telah melakukan beberapa kegiatan baik yang menunjang maupun mendukung capaian program dan kegiatan secara langsung, dengan eviden sebagai berikut :

Forum Renja 2024 (Sekretariat)



Tersusunnya 2 Dokumen Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yaitu :

- a. Dokumen Rencana Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Banten TA. 2024
- b. Dokumen Peta Bisnis Proses 2023 dan Penyempurnaan Rencana Strategis

2023 -2026

Rapat Internal (Evaluasi kegiatan di Sekrertariat)



Terselenggaranya rapat evaluasi internal yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten guna mensinergikan kegiatan dan mengantisipasi kendala dan permasalahan

Sosialisasi Peraturan Perundang – undangan (Sub Bagian Umum dan Kepagawaiannya)



Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan bagi ASN dilingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Banten

Rapat Pengelolaan Anggaran Keuangan (Sekretariat)

Terlaksananya rapat pengelolaan keuangan anggaran yang ditujukan untuk menunjang dan meningkatkan tata kelola keuangan yang akuntabel dan memenuhi SAP (Standar Akutansi Pemerintah)

Pemeliharaan Kendaraan

Pemeliharaan Gedung



Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas dan gedung kantor yang dilakukan untuk menunjang dan meningkatkan sarana dan prasarana perkantoran yang berkualitas

3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian Kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir .

Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Capaian	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria / Kode	Target Akhir RPJMD
			2021	2022	2023	2023	2023	2023	
1	2	3			4	5			7
Meningkatnya Pertumbuhan dan Kontribusi Ekonomi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Domestik dan Asing)	Jumlah	17.528.110	60.817.391	20.060.922	25.664.013	127.93 %	Sangat Baik	23.223.025
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai	80	A	80	81.25	110 %	Sangat Baik	80,00

Keterangan :

1. Data capaian kinerja SAKIP di dapat dari pengukuran kinerja SAKIP Dinas Pariwisata Provinsi Banten (yang dituangkan dalam BA SAKIP Inspektorat) TA. 2022
2. *Jumlah kunjungan wisatawan diperoleh dari SIMPARDA <https://simparda.bantenprov.go.id/> per tanggal 18 Januari 2023.
3. Pengeluaran Rata – rata wisatawan diperoleh dari Buku Neraca Satelit Pariwisata Daerah (NESPARDA) Dinas Pariwisata Provinsi Banten TA. 2023
4. Rata Rata lama Inap di peroleh dari berita resmi statistik BPS Perwakilan Banten yang disampaikan melalui zoom meeting live tanggal 01 Desember 2023 dengan nomor surat undangan press release B-1989/36510/HM.360/11/2023 tanggal 28 November 2023

3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

NO	Indikator Sasaran	Capaian 2022	Target	Realisasi	Persentase	Target Akhir Renstra 2026	Capaian s/d 2023 terhadap target 2026
			2023	2023	2023		
1	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan (Domestik dan Asing)	60,817,391	20.060.922	25.664.013	127.93 %	23.223.025	117.83

Berdasarkan data tersebut capaian ini terlihat bahwa posisi s/d desember 2023 adalah sejumlah 25.349.258 orang wisatawan nusantara sementara untuk kunjungan wisatawan mancanegara sejumlah 314.755 orang sehingga jumlah total kunjungannya menjadi 25.664.013 orang sehingga pencapaian persentase kunjungannya sebesar 127.93 %

NO	Indikator Sasaran	Capaian 2022	Target	Realisasi	Persentase	Target Akhir RPJMD 2023	Capaian s/d 2023 terhadap target 2023
			2023	2023	2023		
2	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	80 (A)	80	81.25	102 %	80	102 %

3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional :

Secara umum perbandingan antara kinerja Kementerian Pariwisata Republik Indonesia dengan Dinas Pariwisata Provinsi Banten belum dapat disandingkan secara konkrit hal ini disebabkan adanya luas wilayah dan kewenangan yang berbeda berdasarkan aturan dan perundang – undangan yang berlaku pada masing – masing K/L/D/I namun begitu melalui pendekatan keterkaitan program dan kegiatan yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata Provinsi Banten berdasarkan rencana pemerintah daerah (RPD) sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022 dapat kami sandingkan keterkaitan antara program dan kegiatan prioritas daerah dan prioritas nasional sebagai tabel berikut :

DINAS PARIWISATA (DAERAH)				DINAS PARIWISATA (DAERAH)		
NO	PRIORITAS DAERAH / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET
Pemerataan Pembangunan dan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi				Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan		
1	Program Pengembangan Destinasi	Persentase Penataan dan Pengembangan Destinasi	20 (%)	Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Rill dan Industrialisasi	Kontribusi PDB Pariwisata	(8.9.1*) %
2	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif Provinsi	25 (%)	Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Rill dan Industrialisasi	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Rp (Trilun)
3	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM yang memiliki Sertifikat di sektor Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif	100 (orang)	Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Rill dan Industrialisasi	Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata	(8.9.2*) (Juta Orang)

Sumber lampiran RPD tabel 6.5 (Pergub 3 Tahun 2022)

3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Sasaran pertama "Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan (Domestik dan Asing)"

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan (Domestik dan Asing)"	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Domestik dan Asing)"	<p>Jumlah Realisasi Wisatawan Mancanegara dan Nusantara Tahun N</p> <p>Jumlah Realisasi Wisatawan Mancanegara dan Nusantara Tahun N x 100</p>

Sumber data kunjungan wisatawan diperoleh dari *counter part* masing – masing Kab/Kota di Provinsi Banten yang diberikan akses untuk melakukan perhitungan kunjungan wisatawan mancanegara oleh Dinas Pariwisata Provinsi Banten. *counter part* ini berasal dari petugas atau pegawai dan atau pengelola destinasi wisata dari Dinas Pariwisata ataupun pengelola obyek yang tersebar di 8 Kab/Kota dan telah diberikan Surat Keputusan oleh Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten sebagai pemberi tugas.

Analisis ketercapaian kinerja sasaran pertama "Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan (Domestik dan Asing)" adalah sebagai berikut :

1. Prosentase capaian diatas target menjadi 127.93 % dimana terkontribusi pertumbuhan positif wisatawan dari setiap bulan yang dilaporkan
2. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya capaian kunjungan lebih menurun secara kualitas (jumlah) namun secara kuantitas meningkat karena kunjungan tahun sebelumnya didapati adanya kunjungan ke pusat perbelanjaan
3. Peningkatan kunjungan wisatawan ini dipengaruhi dengan adanya penataan dan pengembangan destinasi wisata serta promosi event, hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan data kunjungan dari Kabupaten Lebak.
4. Optimalnya kegiatan fasilitasi / pendampingan pelaporan Simparda yang diselenggarakan oleh bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Provinsi Banten sehingga mempengaruhi kualitas dari durasi waktu penyampaian laporan.
5. Berdampaknya seluruh aktifitas program dan kegiatan sehingga pencapaiannya tepat sasaran

Analisis ketercapaian kinerja Sasaran Kedua "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan" keberhasilannya dipengaruhi oleh hal – hal sebagai berikut :

1. Pada saat dilakukan penilaian oleh APIP terpenuhinya seluruh komponen penilaian SAKIP dengan peroleh skor 82.00 %
2. Tidak terdapat deviasi perhitungan antara target dan hasil bobot yang dihitung kegiatan yang mendukung terhadap capaian urusan penunjang program pemerintahan daerah.
3. Pada teknis pelaksanaan tersedianya tools pengisian pengukuran kinerja Sistem Informasi Kinerja Aparatur (SIKAP) oleh BKD Banten mempermudah para *Middle manager* (PPTK) melakukan pemantauan dan pengawasan terkait pekerjaan harian yang umumnya terhubung dengan kegiatan baik sebagai kinerja penunjang maupun pendukung sehingga efektifitas pengawasan berjalan baik dan hal tersebut berdampak terhadap waktu dan kualitas dari pelaksanaan kegiatan.
- 4 terdapat komitmen yang memadai berupa perjanjian kinerja yang terukur antara target dan kinerja yang disusun oleh masing – masing *lower manager* (ketua tim pelaksana kegiatan) sehingga mempengaruhi ketercapaian terhadap sasaran kinerja program.
5. Ketercapaian terhadap program dan kegiatan telah mengarah kepada capaian outcome seperti :
 - a. Tersedianya dokumen perencanaan yang SMART sehingga memudahkan PPTK, Kassubag dan Fungsional umum untuk mencapai target dan tujuan kegiatannya

- b. Terdapat efisiensi dan efektifitas terhadap seluruh kegiatan hal ini dapat dilihat dari adanya efisiensi penyerapan anggaran sehingga sisa penyerapan dimaksud dapat dilakukan optimalisasi guna mendukung target program dan sasaran strategis lainnya.

Faktor Penghambat belum tercapainya rata – rata pengeluaran pada sasaran strategis pertama “meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara” adalah sebagai berikut :

1. Daya beli masyarakat belum optimal faktor yang mempengaruhinya adalah adanya dampak resesi ekonomi sehingga wisatawan mengencangkan pengeluaran
2. Produk Pariwisata dan Ekonomi Kreatif masih belum bisa bersaing baik dari segi rasa (*flavour*) dan harga (*price*) serta pemasaran (*outlet*) produk lokal yang belum optimal di destinasi kawasan strategis pariwisata provinsi Banten.
3. belum optimalnya keramahtamahan (*hospitality*) dari para pelaku pariwisata terhadap wisatawan yang berkunjung terutama bagi yang akan membeli produk

Tindak lanjut penyelesaian permasalahan yang terjadi dalam upaya mencapai sekaligus meningkatkan rata – rata pengeluaran adalah sebagai berikut :

1. Memantau perkembangan resesi global dan upaya lain yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan pengeluaran wisatawan diantaranya adalah dengan menggunakan pemanfaatan teknologi serta aplikasi marketplace yang tersedia.
2. Melakukan kegiatan peningkatan kemampuan produk mulai dari mengolah rasa, menentukan harga hingga menjalin kerjasama dengan pelaku UMK /UMKM Lainnya yang telah memiliki tempat strategis
3. Melakukan kegiatan optimalisasi sadar wisata dalam perspektif bisnis agar pelaku dapat memahami dan mengerti tentang pelayanan kepada customer (*customer satisfaction*)

3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dari target realisasi anggaran sebesar Rp. 14.837.963.000 terealisasi sebesar Rp. 14.363.409.558 atau sekitar 96,80 % belum optimalnya capaian belanja tidak langsung (BTL) ini disebabkan ada 1 (satu) jabatan eselon III yang belum terisi dan penyesuaian beberapa jabatan fungsional yang disesuaikan besarnya berdasarkan aturan dan perundang - undangan yang ada serta adanya 1 (satu) orang pejabat eselonering yang pension dan masih terdaftar dalam pemberian gaji dan tunjangan.

Dari target realisasi anggaran sebesar Rp. 34.428.213.500,- yang terealisasi hanya Rp 33.046.547.141,- atau sekitar 94.77 %.



Berdasarkan hasil analisis komposisi rencana dan realisasi anggaran pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten di dapat porsi realisasi anggaran lebih rendah yaitu sebesar Rp. 15.742.090.680 dari jumlah total anggaran pagu sebesar Rp. 20.401.934.300 yaitu sekitar 81.20 %. Hal ini langkah efektifitas dan efisiensi terhadap anggaran dimana terdapat beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut diantaranya :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada beberapa sub dapat mengefisiensikan penggunaan anggaran yaitu pada :
 - a. Pekerjaan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dapat melaksanakan kegiatan tanpa mempergunakan uang transportasi pada masing – masing anggaran yang tersedia di masing – masing pegawai namun dapat di efektifkan dengan melakukan penggunaan salah satu uang transportasi pegawai dan diberangkatkan secara bersama – sama sesuai surat perintah tugas (SPT)
 - b. Pekerjaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, RKA, DPA

hingga RKAP dan DPPA, Ketua tim pelaksana tugas bersama pengelola administrasi melakukan pendokumentasian kegiatan tanpa mempergunakan anggaran penjilidan dan penggandaan dalam jumlah banyak serta mengoptimalkan penggunaan kertas (A4/F4) yang diberikan oleh sub bagian umum dan kepegawaian untuk dipergunakan dalam penyusunan dokumen – dokumen yang diperlukan tersebut.

2. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah juga telah melakukan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran dimana pekerjaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran lebih dioptimalkan dengan melakukan pemeliharaan secara personal bagi pegawai yang mempergunakan peralatan tersebut agar langkah strategis penghematan dapat dilaksanakan.
3. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kegiatannya juga telah menerapkan hal yang sama dengan kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dimana efisiensi dan efektifitas khususnya penggunaan kertas (A4/F4) yang diberikan oleh sub bagian umum dan kepegawaian untuk dipergunakan dalam penyusunan dokumen –dokumen yang diperlukan tersebut.

Secara umum adanya penyerapan yang tidak mencapai 90 – 100 % anggaran dalam beberapa kegiatan sebagaimana keterangan diatas adalah merupakan bukti dan bagian dari adanya efisiensi dalam pemanfaatan anggaran sehingga untuk tercapainya kinerja program atau kegiatan dapat dilakukan melalui kerjasama antar kegiatan maupun tidak mempergunakan anggaran yang tidak menunjang tujuan kegiatan tersebut sehingga efisiensi yang dilakukan dapat mendukung efektifitas penyelenggaraan kegiatan dilingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Banten.

Sementara itu efektifitas Dukungan sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan anggaran pada tahun 2023 yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata Provinsi Banten sebagaimana tabel dibawah ini

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN						JUMLAH
		S3	S2	S1	D3	D2	SLTA	
1	Kepala Dinas	-	1	-	-	-	-	1
2	Sekretaris	-	-	1	-	-	-	1
3	Kepala Bidang/UPT	-	2	1	-	-	-	3
4	Kepala Subbag	-	-	1	-	-	-	1
5	Fungsional	-	10	5	-	-	-	15
6	Staf / Pelaksana	-	4	13	8	-	7	32
7	Pramubakti Administrasi	-	2	12	-	1	14	29

TOTAL	0	19	33	8	1	21	84
% terhadap Jumlah Pegawai	0	22,62	39,29	9,52	1,19	25,00	100,00

Menunjukan bahwa tingkat pendidikan SDM Dinas Pariwisata Provinsi Banten didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 33 orang (39,29%) , disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 19 orang (22.62%), D3 8 orang (9.52%), SLTA sebagai staf pelaksana dan pramubakti administrasi sebanyak 21 orang (25.00%). Komposisi pegawai laki-laki sedikit lebih banyak dibanding pegawai perempuan; namun untuk jabatan struktural lebih banyak dijabat perempuan. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur. Namun begitu dengan adanya keterbatasan SDM baik dari jumlah maupun tingkat kompetensinya tidak lantas membuat hal ini menjadi kendala dalam melaksanakan tugas pembangunan di bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif.

3.1.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

1. Program Pemasaran

Program kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang Pemasaran ini memiliki peran penting terhadap peningkatan promosi, kunjungan wisatawan (nusantara dan mancanegara) serta investasi di Provinsi Banten. Kegiatan ini meliputi ; sarana dan prasarana promosi, fasilitasi event dalam dan luar daerah serta aktivitas promosi media sosial kekinian sebagai sarana untuk memperkenalkan daya tarik wisata di Provinsi Banten.

Program ini menunjang Promosi Pariwisata yang berdampak terhadap Jumlah Kunjungan Wisata dengan pencapaian target sebagai berikut :



Capaian Target dan Realisasi 2023

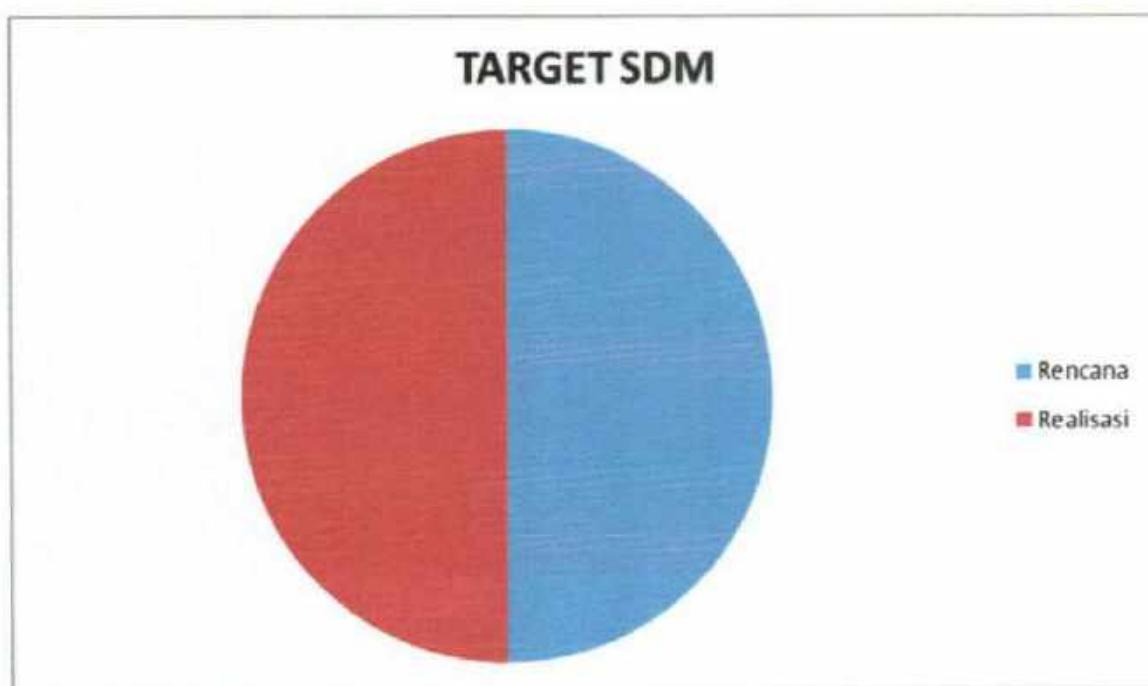
Nama Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (%)	Capaian (%)
Program Pemasaran	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan	5	5.34	106.75
	Prosentase jumlah promosi wisata	100	100	100

Sementara target promosi di tahun 2023 pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten adalah sebesar 5 % dari 4 event promosi sehingga capaian **100 %** dengan predikat **"Sangat Baik"**

2. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Program kegiatan ini dilaksanakan oleh bidang SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, program ini memiliki peran penting terhadap peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Provinsi Banten. Kegiatan ini meliputi ; Pemberian sertifikat, peningkatan peran masyarakat dalam rangka pengembangan kemitraan pariwisata dan fasilitasi pengembangan kompetensi pariwisata dan ekonomi kreatif.

Fokus pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diarahkan kepada wisatawan sumber daya manusia di Provinsi Banten. Pelaksanaannya sesuai amanat perundang – undangan dimana SDM yang diberikan pembekalan maupun pelatihan adalah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang tingkat lanjutan dimana bagi SDM yang baru harus melalui tahapan pembinaan dan pelatihan di Dinas Pariwisata Kab/Kota sehingga pemanfaatan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dan perekonomian masyarakat di Banten sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana pengembangan kawasannya berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi (Ripparprov) sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2019.



Capaian Target dan Realisasi 2023

Nama Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (%)	Capaian (%)
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM yang memiliki Sertifikat di Sektor Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif	1.644	1.644	100

Berdasarkan share kontribusi dan pentargetan SDM di Tahun 2023 bahwa pencapaian indikator sasaran dengan target 2285 pelaku SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang terbina telah tercapai sehingga capaian kinerjanya mencapai **100 %** dengan predikat "Sangat Baik"

3. Program Peningkatan Daya Tarik Wisata Provinsi

Program kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang ini memiliki peran penting terhadap peningkatan daya saing pariwisata di Banten terutama dalam pemenuhan aspek strategis dalam penataan dan pengembangan destinasi pariwisata meliputi ; amenitas, atraksi dan aksesibilitas sebagai penopang dalam peningkatan kunjungan wisatawan.

Fokus pembangunan daya tarik kepariwisataan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Banten di tetapkan pengembangan kawasannya berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi (Ripparprov) sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2019.



Berdasarkan berita resmi statistik BPS Perwakilan Banten yang disampaikan informasi perkembangan terkait rata – rata lama menginap tamu (asing dan nusantara) di Provinsi

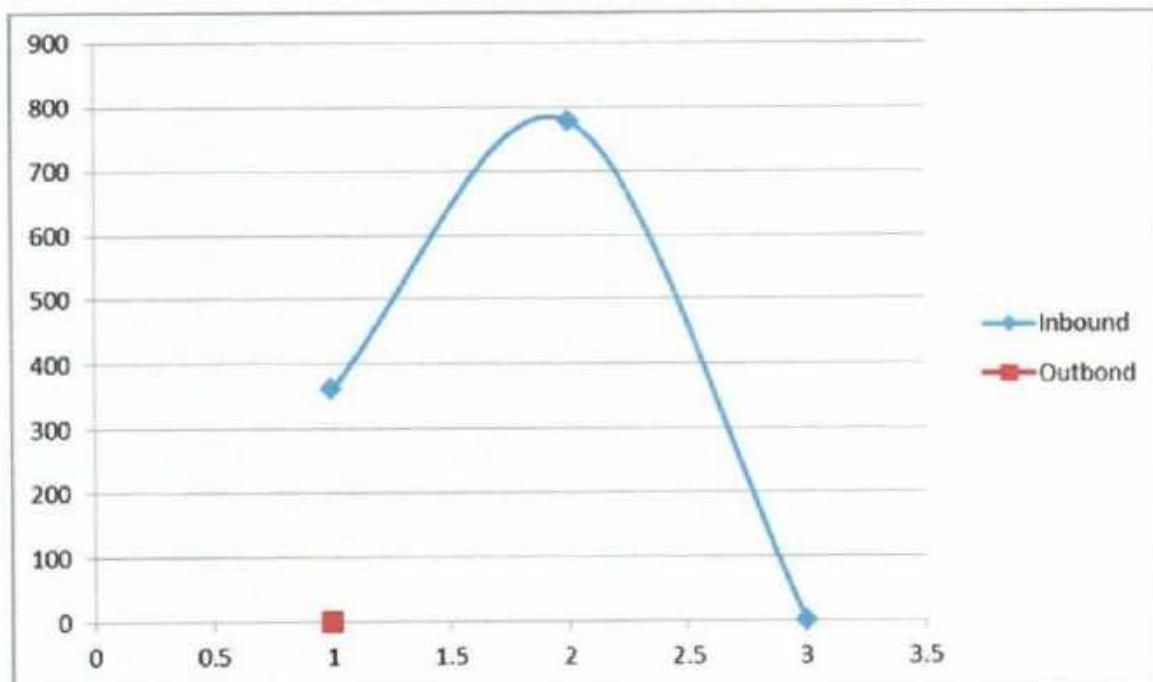
Banten untuk s.d Bulan November 2023 terhitung 1.50 hari sehingga target capaian dari 1.66 hari adalah sebesar **90.36 %**, dengan predikat "Tinggi"

Program Kegiatan yang tidak optimal dalam melakukan pencapaian target adalah

1. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Program kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini memiliki peran penting terhadap peningkatan Pelaku Industri pariwisata yang profesional dalam pemenuhan kapasitas dan kapabilitas industri pariwisata dan ekonomi kreatif meliputi ; fasilitasi dan pembinaan industri pariwisata dan ekonomi kreatif.

Fokus bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini diarahakan kepada pendukungan pengembangan pariwisataan sebagaimana yang telah di tetapkan dalam rencana pengembangan kawasannya berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi (Ripparprov) sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2019.



Dimana konsultan PT Sketsa Negeri Mandiri telah melakukan penyusunan dokumen neraca satelit pariwisata daerah (Nesparda) Dinas Pariwisata Provinsi Banten TA. 2023 yang diperoleh dari pengolahan data primer hasil survey 2022, data studi literatur Nesparda 2015 dan 2021 serta simulasi dan perhitungan matematis diperoleh hasil Dampak belanja pariwisata di Provinsi Banten pada tahun 2022 dengan rata-rata sebesar Rp. 2.347.107,- pada tahun 2022 (yang dilaporkan pada dokumen Nesparda 2023)

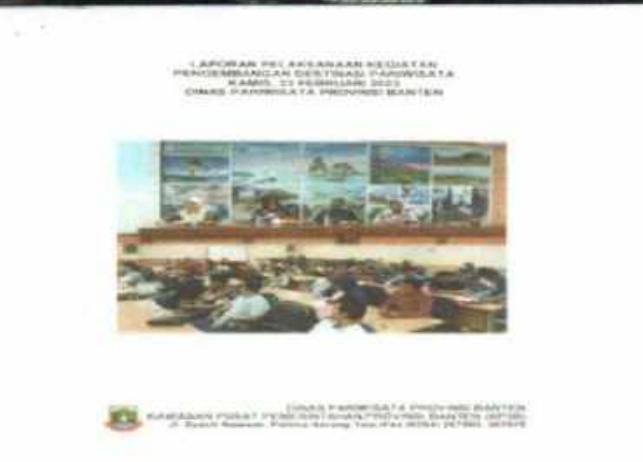
Sehingga target pengeluaran rata – rata wisatawan (nusantara dan mancanegara) berdasarkan target sebesar Rp. 4998799,05 tercapai hanya Rp.2.347.107,- sehingga jika

dihitung prosentasenya tercapai **46.95 %** dengan predikat “**sangat rendah**”

Faktor Penghambat belum tercapainya rata – rata pengeluaran pada sasaran strategis pertama “meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara” adalah sebagai berikut :

1. Daya beli masyarakat belum optimal faktor yang mempengaruhinya adalah adanya dampak resesi ekonomi sehingga wisatawan mengencangkan pengeluaran
2. Produk Pariwisata dan Ekonomi Kreatif masih belum bisa bersaing baik dari segi rasa (*flavour*) dan harga (*price*) serta pemasaran (*outlet*) produk lokal yang belum optimal di destinasi kawasan strategis pariwisata provinsi Banten.
3. belum optimalnya keramahtamahan (*hospitality*) dari para pelaku pariwisata terhadap wisatawan yang berkunjung terutama bagi yang akan membeli produk

Crosscutting lintas Perangkat Daerah dalam mendukung pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif 2023

NO	NAMA KEGIATAN	LOKASI PELAKSANAAN	MITRA KEGIATAN	FOTO DOKUMENTASI
1	2	3	4	5
1	Validasi Data Kunjungan Wisata dari Kab/kota melalui Sistem Informasi Pariwisata Daerah dalam rangka menghitung jumlah kunjungan wisatawan	Dinas Pariwisata Provinsi Banten	Dinas Pariwisata Kabupaten Kota Se-Provinsi Banten	
2	Koordinasi pengembangan destinasi wisata melalui pemanfaatan Sistem Informasi Standarisasi Destinasi Wisata (SisDewi) guna meningkatkan pemanfaatan pengembangan destinasi wisata di Provinsi Banten	Dinas Pariwisata Provinsi Banten	Dinas Pariwisata Kabupaten Kota Se-Provinsi Banten dan Kelompok Sadar Wisata	 
3	Kegiatan Siaga Wisata dalam rangka pengamanan wisatawan dalam menyambut perayaan natal dan tahun baru 2024 di Destinasi Wisata KSPP Provinsi Banten	Dinas Pariwisata Provinsi Banten	Dinas Pariwisata Kabupaten Kota se Provinsi Banten, Kepolisian Daerah Banten, Kelompok Sadar Wisata dan Stakeholder Pariwisata lainnya	

4	Kegiatan forum koordinasi dan komunikasi para pelaku pariwisata melalui kegiatan mingguan "Majelis dzikir Pariwisata"	Destinasi Wisata di 8 Kab/Kota	Dinas Pariwisata Kabupaten Kota se Provinsi Banten, Kepolisian Daerah Banten, Kelompok Sadar Wisata dan Stakeholder Pariwisata lainnya	
5	Partisipasi Fasilitasi Promosi Pariwisata dalam dan luar daerah	Dalam dan Luar Daerah	Dinas Pariwisata Kabupaten Kota se Provinsi Banten Kementerian Pariwisata, UMK dan Stakeholder Pariwisata lainnya	

3.2 RENCANA DAN REALISASI ANGGARAN

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA (RP)	REALISASI (RP)	%
1	2	3	4	5
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	14.837.963.000	14.363.409.558	96.80
B	BELANJA LANGSUNG	34.870.618.500	33.046.547.141	94.77
C	TOTAL PENYERAPAN ANGGARAN (BTL + BL)	49.266.176.500	47.003.911.699	95.41
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	19.385.934.300	18.309.024.858	94.44
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84.529.000	62.815.523	74.31
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.263.000	36.671.849	91.08
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000	4.182.336	83.65
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.000.000	4.182.336	83.65
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5.000.000	4.182.336	83.65
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5.000.000	4.182.336	83.65
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.990.000	3.200.905	80.22
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.276.000	6.213.425	30.64
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.869.463.000	14.388.467.808	96.77
	Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	14.395.598.000	13.957.364.558	96.96
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	442.365.000	406.045.000	91,79
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6,000,000	4.773.002	79,55
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	6,000,000	4.773.000	79.55
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3,000,000	2.386.500	79.55

	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	6,000,000	4.773.000	79.55
	Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4.500.000	3.579.749	79.55
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.000.000	1.058.211	52.91
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	500.000	217.984	43,60
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	500.000	270.000	54.00
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	500.000	300.227	60.05
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	500.000	270.000	54.00
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	46.875.000	33.492.061	71.45
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	500,000	367.050,	73.41
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	500,000	367.910	73.58
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	500,000	346.331	69.27
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15,000,000	11.000.000	73.33
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30,375,000	21.410.770	70.49
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	771.729.870	429.744.524	55.69
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9,634,000	8.866.902	92.04
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	306.696.170	222.180.100	72.44
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.697.200	12.321.060	62.55
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	27.114.000	17.175.398	63.35
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	88,312,500	19.306.370	21.86
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	314.276.000	144.994.729	46.14
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5,000,000	3.900.000	78.00

	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1,000,000	999.965	100
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.618.511.230	2.457.441.701	93,85
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	468.800.630	350.887.916	74.85
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.149.710.600	2.106.553.785	97.99
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	992.826.200	936.004.922	94.28
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	229.668.200	200.356.282	87.24
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	159.030.000	156.268.550	98.26
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	98.128.000	79.547.740	81.07
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	506.000.000	499.832.350	98.78
II	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	19.631.115.200	19.041.349.922	97.00
1	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	1.816.000.000	1.750.068.800	96.37
	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	1.816.000.000	1.750.068.800	96.37
2	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	14.111.926.000	13.705.765.898	97.12
	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	448.000.000	438.318.000	97,84
	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	8.021.820.800	7.849.480.400	97.85
	Pengadaan /Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Provinsi	2.800.000.000	2.765.715.000	98.78
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	2.842.105.200	2.652.252.498	93.22
3	Pengelolaan Destinasi Wisata Provinsi	3.079.420.300	3.023.031.120	98.17
	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	200.000.000	196.359.000	98.18

	Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi	2.879.420.300	2.826.672.120	98.17
4	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	623.768.900	562.484.104	90.18
	Pembinaan dan Pengawasan Industri Usaha Pariwisata	400.000.000	364.567.388	91.14
	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	223.768.900	197.916.716	88.45
III	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	1.940.584.000	1.788.573.675	92.17
1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	1.365.584.000	1.241.226.295	90.89
	Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	1.057.371.000	951.396.399	89.96
	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	308.213.000	289.829.896	94.04
2	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	575.000.000	547.347.380	95.19
	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	200.000.000	193.362.000	96.68
	Perlindungan Hasil Kreativitas	200.000.000	200.000.000	100
	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	175.000.000	153.985.380	87.99
IV	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	4.582.925.100	4.465.793.027	97.44
1	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	4.582.925.100	4.465.793.027	97.44
	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri.	1.165.037.600	1.155.440.169	99.18
	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	2.923.686.500	2.833.042.870	96.90
	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	494.201.000	477.309.988	96.58

V	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	3.725.617.900	3.399.170.325	91.24
1	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	3.225.617.900	2.929.534.372	90.82
	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	497.109.100	454.922.930	91.51
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	1.017.508.800	982.233.874	96.53
	Fasilitas Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	400.000.000	376.219.082	94.05
	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	1.311.000.000	1.116.158.486	85.41
2	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	500.000.000	469.635.953	93.93
	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	200.000.000	194.117.684	97.06
	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	300.000.000	275.518.269	91.84

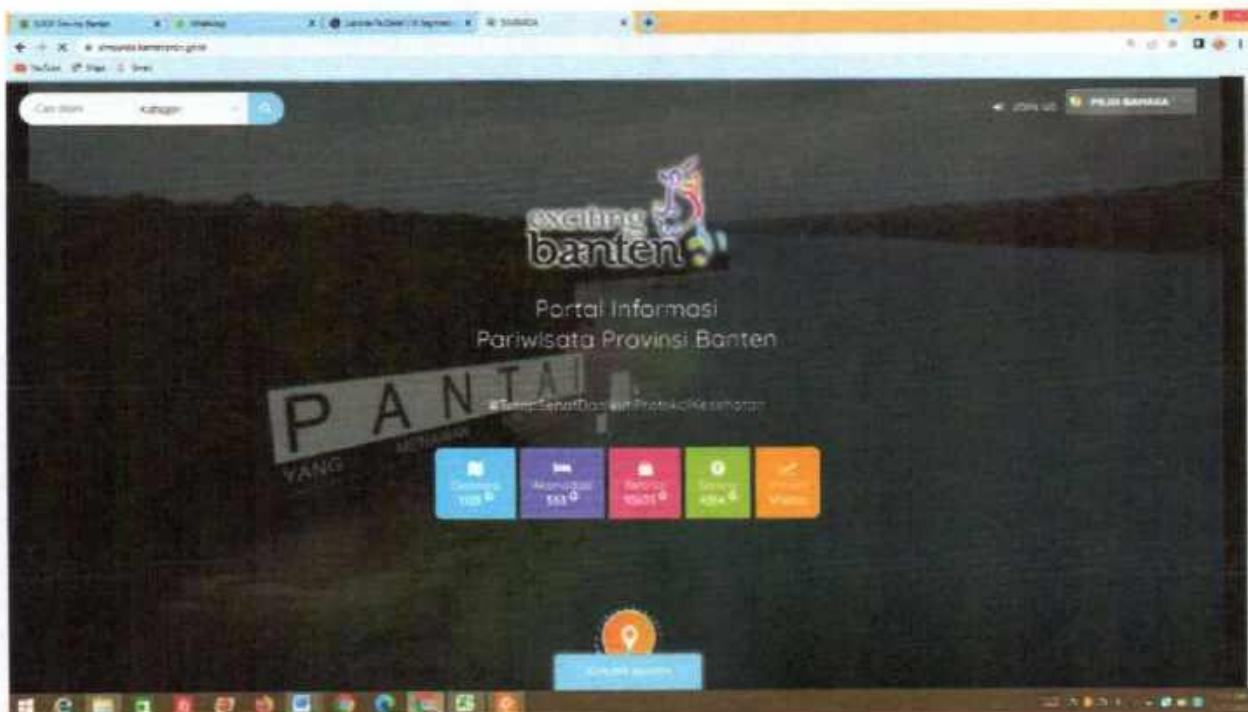
3.3 INOVASI

Nama Inovasi Sistem Informasi Manajemen Pariwisata Daerah (SIMPARDA), Konsep kepariwisataan menyangkut berbagai sektor sehingga dampaknya baik terhadap pertumbuhan, pemerataan dan polainvestasi yang juga multi sektor. Pada tingkat daerah, dampak pariwisata terhadap perekonomian daerah, sudah jelas berdampak signifikan dalam mendongkrak pertumbuhan perekonomian daerah. Upaya dalam mendorong tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan daerah dalam pembangunan pariwisata sangatlah penting dan mutlak di lakukan. Oleh karena itu, diperlukan sistem informasi yang cepat dan terkoneksi dengan seluruh masyarakat, pemerintah serta stake holderkepariwisataan, sehingga dengan adanya sistem informasi pariwisata yang integratif dapat mensosialisasikan serta menjual (selling) produk wisata pada daerah tersebut, yang pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan kunjungan wisatawan baik lokal, regional maupun internasional. Saat ini informasi dan data tentang pembangunan dan pengembangan kepariwisataan daerah baru sebagian dilakukan secara terpisah-pisah di setiap kabupaten/kota, oleh karena itu, dengan menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Pariwisata (SIMPARDA) yang dikoneksi dari Dinas Pariwisata Provinsi Banten keseluruh kabupaten dan kota di Provinsi Banten akan berdampak pada cepatnya informasi penyampaian data tentang perkembangan dan dampak pembangunan kepariwisataan di Provinsi Banten.

Pengembangan Sistem Manajemen Informasi Pariwisata Daerah / SIMPARDA Dinas Pariwisata Provinsi Banten adalah suatu sistem, konsep dan metode tampilan informasi uantitatif dan kualitatif yang menyediakan perangkat informasi serta bahan analisis yang menyeluruh (general), kompak (compact), saling berkait (interconnected), konsisten (consistent) dan kontrol (control) yang mendeskripsikan secaramenyeluruh tentang kondisi terkini (eksisting data) dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Banten. Sistem informasi ini akansangat berguna dan sangat bagi pengambil kebijakan stake holder kepariwisataan, dalam menyusun perencanaan, dan programpembangunan di tingkat daerah Ruang lingkup dalam rangka kegiatan Pengembangan Sistem Manajemen Informasi Pariwisata Daerah, yaitu : Informasi kepariwisataan di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Banten yang meliputi informasi tentangdestinasi wisata secara menyeluruh di masing-masing Objek Destinasi di Wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Banten.Kegiatan ini hanya mencakup kepariwisataan di wilayah provinsi Banten dan hanya akan disajikan pada level provinsi melalui jaringan inter koneksi pada SKPD yang menangani tentang pariwisata daerah.

Tujuan Inovasi

Maksud dilaksanakannya kegiatan Pengembangan Sistem Manajemen Informasi Pariwisata Daerah / SIMPARDA Tahun 2023 ini adalah dengan menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Pariwisata (SIMPAR) yang dikoneksi dari Dinas Pariwisata Provinsi Banten ke seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Banten akan berdampak pada cepatnya informasi penyampaian data tentang perkembangan dan dampak pembangunan kepariwisataan di Provinsi Banten. Tujuan dari Pengembangan Sistem Manajemen Informasi Pariwisata Daerah / SIMPARDA adalah untuk menyusun suatu sistem, konsep dan metode tampilan informasi kuantitatif yang menyediakan perangkat informasi dan data yang menyeluruh (general), kompak (compact), saling berkait (interconnected), konsisten (consistent) dan kontrol (control) yang terkait dengan kepariwisataan di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Banten.



Manfaat dan Hasil Inovasi

Pemerintah Provinsi Banten dalam hal ini melalui Dinas Pariwisata Provinsi Banten dapat mengetahui secara pasti terkait mulai dari Database Kepariwisataan serta Jumlah dan Kunjungan Pariwisata di Provinsi Banten setiap tahunnya. hal ini tentunya dapat menjadi parameter dalam mengukur PDRB (produk domestik regional bruto) sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak roda perekonomian di Provinsi Banten

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023 adalah pertanggungjawaban pelaksanaan akuntabilitas kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Anggaran hingga Sub kegiatan yang selaras dan untuk menghasilkan kinerja yang berdampak terhadap capaian kinerja utama Dinas Pariwisata Provinsi Banten yang diselenggarakan pada Tahun Anggaran 2023 dalam rangka menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara luas melalui program dan kegiatan strategis sesuai yang diamanatkan dalam peraturan dan perundang – undanhan yang berlaku

Namun perlu kami sadari bahwa pencapaian kinerja pada tahun ini khususnya pada rata – rata pengeluaran wisatawan kurang membanggakan hal ini disebabkan adanya beberapa faktor diantaranya :

1. Daya beli masyarakat belum optimal faktor yang mempengaruhinya adalah adanya dampak resesi ekonomi sehingga wisatawan mengencangkan pengeluaran
2. Produk Pariwisata dan Ekonomi Kreatif masih belum bisa bersaing baik dari segi rasa (flavour) dan harga (price) serta pemasaran (outlet) produk lokal yang belum optimal di destinasi kawasan strategis pariwisata provinsi Banten.
3. belum optimalnya keramahtamahan (hospitality) dari para pelaku pariwisata terhadap wisatawan yang berkunjung terutama bagi yang akan membeli produk

4.2 Saran dan Rekomendasi

Untuk itu kedepan diperlukan *redesign* pembuatan pohon masalah yang relevan, crosscutting yang sesuai serta dapat ditindaklanjutinya melalui program dan kegiatan yang nyata dalam kerjasama lintas stakeholder tersebut dan melakukan

upaya nyata terhadap efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya agar program kegiatan memiliki fungsi "program follow function" serta menguatkan beberapa faktor pendukung yaitu :

1. Memantau perkembangan resesi global dan upaya lain yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan pengeluaran wisatawan diantaranya adalah dengan menggunakan pemanfaatan teknologi serta aplikasi marketplace yang tersedia.
2. Melakukan kegiatan peningkatan kemampuan produk mulai dari mengolah rasa, menentukan harga hingga menjalin kerjasama dengan pelaku UMK /UMKM Lainnya yang telah memiliki tempat strategis
3. Melakukan kegiatan optimalisasi sadar wisata dalam perspektif bisnis agar pelaku dapat memahami dan mengerti tentang pelayanan kepada customer (customer satisfaction)

Akhir kata Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023 disusun dalam rangka pertanggungjawaban, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kegiatan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan yang menjadi kewenangan Dinas Pariwisata Provinsi Banten.

Serang, Januari 2024

KEPALA DINAS





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. AL HAMIDI, S.Sos, M.Si**

Jabatan : **KEPALA DINAS PARIWISATA**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **AL MUKTABAR**

Jabatan : **Pj. GUBERNUR BANTEN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, Januari 2023

Pihak Kedua,

A handwritten signature of Al Muktabar.

AL MUKTABAR

Pihak Pertama,

A circular purple stamp with the text "PEMERINTAH PROVINSI BANTEN" around the top edge, "DINAS PARIWISATA" in the center, and "H. AL HAMIDI, S.Sos, M.Si" and "NIP. 19640817 198603 1 022" at the bottom.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	Nilai	70-80
2	Meningkatnya Pertumbuhan dan Kontribusi Ekonomi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Domestik dan Asing)	Orang	20.060.922

PENDAPATAN DAERAH

KODE	URAIAN	ANGGARAN
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0

BELANJA DAERAH

KODE	URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	49.641.000.000
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	19.580.290.000
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	18.615.355.000
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	5.295.355.000
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	2.300.000.000
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	3.850.000.000
TOTAL BELANJA		49.641.000.000

Pj. GUBERNUR BANTEN,

AL MUKTABAR

KEPALA DINAS PARIWISATA,



H. AL HAMIDI, S.Sos, M.Si

BNR.19640817 198603 1 022



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN INSPEKTORAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang Telp. (0254) 7039946, Fax (0254) 267041

PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS PARIWISATA PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen **Dinas Pariwisata Provinsi Banten**.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Serang, Februari 2024

Pit. INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI BANTEN

